Tabel 92. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	BIDANG PENDIDIKAN											
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APK PAUD - APK SD Sederajat - APM SD sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka putus sekolah SD - APK SMP Sederajat - APM SMP sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun - Angka Putus sekolah SMP - Angka Melek Huruf Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	66,71	1,391,777,152,433	980,335,699,507	1. Waktu ket:Dikarenakan pelaporan dijadwalkan pada Tanggal 28 Februari 2026 Penilaian SAKIP pada Bulan Juni/Juli 2026. Nilai diatas adalah capaian Tahun 2024	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8	2	1.485.611.400	421.388.554	1. Waktu ket:Penyusunan dokumen SAKIP ditetapkan 28 februari 2025	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	71894	71894	1.365.988.380.616	965.997.201.077		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Dokumen	964	900	766.840.900	336.566.800		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	Orang	771	771	264.566.250	208.293.720		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Orang/Bulan	23708	23708	2.435.310.600	2.031.162.391		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Unit	30	30	385.903.800	312.156.000		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Buah	6335	6335	16.087.970.967	7.662.373.006		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Unit	528	528	4.362.567.900	3.366.557.959		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APK PAUD - APK SD Sederajat - APM SD sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka putus sekolah SD - APK SMP Sederajat - APM SMP sederajat - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun - Angka Putus sekolah SMP - Angka Melek Huruf	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Persen	89.71	86.95	831,676,444,590	557,057,089,669	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Persen	88.71	83.42			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Persen	83.02	103.59			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Persen	68.38	92.13			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih banyaknya data DTKS dan data capil yang tidak sinkron sehingga menyebabkan data anak tidak sekolah (ATS) menjadi tinggi	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	3000	201				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	92.94	99	416.044.597.552	262.825.268.564	1. Anggaran ket:1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	88.65	90			1. Anggaran ket:Tingkat kopetensi murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	95.23	61			1. Anggaran ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	85.65	87			1. Anggaran ket: 1. Masih rendahnya anggaran untuk Pembanguann Ruang Tata Usaha, Pembanguan Ruang UKS dan Pembangunan Halaman SD dikarenakan memprioritaskan pembangunan ruang kelas, laboratorium komputer dan toilet.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	98.23	66			1. Anggaran ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	76.23	51			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 2. Regulasi/Peraturan ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 3. Anggaran ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	89.08	98			1. Pihak Eksternal ket:Masih rendahnya pemahaman pada satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dan menindak lanjuti hasil rapor pendidikan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar	Persen	86.08	54			1. Anggaran ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	Persen	90.37	54	229.539.992.354	155.377.833.391	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya peningkatan program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar isi Pendidikan SMP	Persen	85.94	92			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kopetensi murid yang harus di tingkatkan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar proses Pendidikan SMP	Persen	92.94	65			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	Persen	80.8	80			1. Anggaran ket:1. Masih rendahnya anggaran untuk Pembanguann Ruang Tata Usaha, Pembanguan Ruang UKS dan Pembangunan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Halaman dikarenakan memprioritaskan pembangunan ruang kelas, laboratorium komputer dan toilet. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pengelolaan Pendidikan SMP	Persen	93.51	93			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Persen	76.8	65			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih rendahnya "Proporsi PTK penggerak : Jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru dan kepala sekolah," serta "Proporsi guru yang menjadi guru penggerak : Jumlah guru yang lulus program guru penggerak dibagi total guru,"	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar pembiayaan Pendidikan SMP	Persen	87.37	90			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih rendahnya pemahaman pada satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dan menindak lanjuti hasil rapor pendidikan.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar penilaian Pendidikan SMP	Persen	81.51	72			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	Persen	89.83	81	141.500.070.915	112.918.305.404	1. Waktu ket:Masih terdapat satuan PAUD yang belum terdampingi mengingat lokasi relatif jauh dari Puskesmas	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Isi Pendidikan PAUD	Persen	91.58	74			1. Dukungan Pemimpin ket:Perubahan Mindset yang relatif lambat sehingga untuk melakukan adaptasi dengan kurikulum baru agak terhambat	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Proses Pendidikan PAUD	Persen	98.49	84			1. Peralatan ket:Penguasaan TIK yang masih lemah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persen	43.84	23.35			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 2.Regulasi/Peraturan ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 3. Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah 4. Dukungan Pemimpin ket:kualifikasi guru yang belum sesuai standar, keterbatasan pelatihan, minimnya dukungan kebijakan dan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta motivasi dan kesejahteraan pendidik yang rendah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	Persen	73.98	94			1. Anggaran ket:1. Adanya tambahan anggaran ada di APBD Perubahan sehingga kesulitan dalam merencakan untuk peruntukan pemenuhan parasarana dalam bentuk bangunan. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	Persen	92.85	89			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pelaksanaan supervisi yang	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dilakukan masih belum maksimal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	Persen	83.55	87			1. Peralatan ket:Di semester awal sebagian sekolah kesulitan membuat SPJ karena kondisi laptop sebagian bermasalah	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Penilaian Pendidikan PAUD	Persen	87.15	91			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Sebagian guru masih lemah dalam penggunakan komputer	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	Persen	68.72	58	44.591.783.769	25.935.682.310	1.Regulasi/Peraturan ket:Standar dan indikator yang digunakan dalam rapor pendidikan berbeda dengan yang digunakan untuk perhitungan sebelumnya. Sehingga harus melakukan penyesuaian Kedua : sebagian personal yang jadi sasaran survey ANBK sebagai dasar oerhitungan rapor pendidikan banyak yang belum faham dan mengisi dengan tidak maksimal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	Persen	72.62	96			1.Regulasi/Peraturan ket:Sebagian indikator untuk pendidikan kesetaraan masih belum terisi atau tidak ditemukan skor dan nilainya pada rapor pendidikan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	Persen	72.58	63			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Rata-rata rekruitmen tutor baru dilakukan pada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pertengahan tahun/tahun pelajaran dan baru di bimtek pada penghujung tahun	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	Persen	65.53	38			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kesulitan guru/tutor untuk mengikuti program guru penggerak dan Pendidikan Profesi	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan	Persen	67.29	81			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Bertambahnya satuan pendidikan baru SKB yang belum terpenuhi sarana dan prasarananya menyebabkan skor capaian menjadi menurun Tambahan anggaran berada di Perubahan sehingga kesulitan diperuntukan untuk Bangunan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Persen	67.58	94			1.Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan indikator capaian dan sistem penskoran	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	Persen	62.38	61			1. Pihak Eksternal ket:Perencanaan masih belum berpusat pada Data evaluasi diri	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	Persen	67.43	67			1. Alokasi dan Kapasitas SDM	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Angka Melek Huruf	Persen	99.98	100			1. Pihak Eksternal ket:Angka capaian menurun karena dengan adanya data baru yang bersumber dari DTK dan PTKE ternyata ditemukan tambahan data warga	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											belum tuntas aksara Faktor Kedua : yang bersangkutan setelah dilakukan verifikasi dan diajak untuk nebgikuti program pemberatantasn buta aksara rata-rata tidak mau dengan berbagai alasan	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APM SD sederajat - APM SMP sederajat	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	100	100	2,271,233,140	2,064,387,750	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	Dokumen	2	2	2.271.233.140	2.064.387.750	1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	Dokumen	1	1			1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	Dokumen	1	1			1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	Dokumen	1	1			1. Anggaran ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal 2. Waktu ket:Masih Proses Penyusunan TIM Kurikulum Muatan Lokal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas - APM SD sederajat - APM SMP sederajat	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Prosentase terpenuhinya jumlah guru	Persen	95	100	3,772,852,400	3,710,677,000		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	Rasio	80	80	3.772.852.400	3.710.677.000		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Rasio Guru dengan Peserta didik SD	Rasio	80	80				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	Rasio	80	80				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100	100	965,422,460	734,337,800		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			- Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun - Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun									
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar	Dokumen	61	13	-	-	1.Regulasi/Peraturan ket:Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian pendidikan Anggaran Ket : Kurangnya anggaran untuk melakukan survey Kelayakan Ijin Pendirian dan Ijin Perpanpajang Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non-Formal	Dokumen	100	477	965.422.460	734.337.800	1. Pihak Eksternal ket:Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian pendidikan. Kurangnya anggaran untuk melakukan survey Kelayakan Ijin Pendirian dan Ijin Perpanpajang Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat 2. Anggaran ket:Sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan kementerian pendidikan. Kurangnya anggaran untuk melakukan survey Kelayakan Ijin	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Pendirian dan Ijin Perpanpajang Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	
2.	KESEHATAN											
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	93,9	509.681.178.936	422.538.850.099	1. Anggaran ket:Efisiensi anggaran dan beberapa kali proses penerbitan DPA yang terlambat sehingga beberapa kegiatan ada yg tidak bisa terlaksana atau tertunda 2. Waktu ket:Efisiensi anggaran dan beberapa kali proses penerbitan DPA yang terlambat sehingga beberapa kegiatan ada yg tidak bisa terlaksana atau tertunda	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	638.505.800	380.964.298		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	420.010.518.089	380.330.475.845		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	63.548.000	59.113.298		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	391.513.000	302.375.073		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.261.292.040	1.102.629.688		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	22	14	2.334.523.500	2.320.516.022		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	31.470.036.115	14.397.477.202		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	42	42	1.145.749.000	760.605.465	1. Peralatan ket:Ketersediaan sarana prasarana	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nila AA	Nilai	32	32	52.365.493.392	22.884.693.208		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Presentasi Balita Stunting	Persen	14,1	102,84	385.412.378.051	301.856.085.716	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Keluarga sehat	Persen	0,4	90				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,76	110,53				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,77	116,88				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,63	52,38				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,52	157,69				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0,89	110,11				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,43	200				
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0,48	100				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persen	78	78	142.911.034.025	130.966.842.103	1. Anggaran ket:Efisiensi anggaran pada beberapa paket pekerjaan yang sudah di anggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran 2. Waktu ket:Efisiensi anggaran pada beberapa paket pekerjaan yang sudah di anggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan 12 SPM	Persen	100	89,08	232.730.567.130	161.541.427.405		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persen	30	30	2.495.860.596	2.397.840.895		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100	100	7.274.916.300	6.949.975.313		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	80	118,1	2.520.077.690	1.969.922.731		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	Izin	1500	1195	310.849.360	193.231.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Dokumen	80	80	582.951.690	479.845.600		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Menurunnya Angka	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Terselanggaranya Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	647.615.600	543.402.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kematian Bayi - Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat									
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memilki izin	Persen	100	100	99.370.000	97.835.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Kegiatan	15	15	106.185.000	103.840.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	942	942	196.415.600	177.445.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	253	253	202.265.000	121.080.000		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) - Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	% Capaian RT-PHBS	Persen	36	144,44	1.134.177.000	765.821.313		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas	Persen	50	50	137.129.400	124.371.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan SDM dalam mengadvokasi lintas sektor terkait	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Persen	55	90	162.128.000	144.216.924		
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	Persen	36	32,91	834.919.600	497.233.389	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya kemampuan SDM untuk mengadvokasi lintas sektor terkait	
3.	BIDANG PEKERJA UMUM											
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesbilitas Jalan Kabupaten Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,25	100	268.211.498.001	207.594.539.588	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Ada nya Efisiensi Pada Alokasi Anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	0,03	574.195.930	223.521.075	1. Anggaran ket:Belum Terpenuhi	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	1	0	248.738.699.402	196.076.476.371		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Laporan	50	0	136.602.000	97.060.000		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	807.774.000	485.507.996		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENATAAN RUANG											
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	100	0	4.538.407.488	2.426.257.292		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	0	12.177.692.481	7.367.003.277		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	50	0	1.238.126.700	918.713.577		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0,72	100	166.011.250.453	115.547.530.613		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,23	100				
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,03	100				
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi	Hektar (Ha)	0,13	0,13	98.111.643.930	71.497.845.912		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	Persen	76,51	76,51	67.899.606.523	44.049.684.701		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Sistem Drainase	Persen	3,96	100	64.700.000.000	53.116.442.717		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Sistem Drainase	Ha	13	13	64.700.000.000	53.116.442.717		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Penataan Bangunan Gedung	Persen	67,25	100	11.195.459.137	4.680.365.003	1. Anggaran ket:kurangnya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dapat Digunakan	Unit	2	2	11.195.459.137	4.680.365.003	1. Anggaran ket:kurangnya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	81,88	100	273.345.845.731	193.766.882.112	1. Anggaran ket:tidak tersedianya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan di kabupaten	Unit	15	15	273.345.845.731	193.766.882.112	1. Anggaran ket:tidak tersedianya anggaran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesbilitas Jalan Kabupaten	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	64,95	98,88	948.647.787.668	743.166.387.387	1. Regulasi/Peraturan ket:ada beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi jalan dari sebelumnya mantap menjadi tidak mantap, pada tahun 2025 sebanyak 196 ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi hal ini disebabkan antara lain kendaran ODOL (over dimension dan over loading) serta kondisi alam dimana akhir-akhir ini	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa ruas jalan mengalami kerusakan bahkan ada yang menglami longsor	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Kilometer	1424,39	1408,61	948.647.787.668	743.166.387.387	1. Regulasi/Peraturan ket:ada beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi jalan dari sebelumnya mantap menjadi tidak mantap, pada tahun 2025 sebanyak 196 ruas jalan kabupaten yang mengalami penurunan kondisi hal ini disebabkan antara lain kendaran ODOL (over dimension dan over loading) serta kondisi alam dimana akhir-akhir ini intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa ruas jalan mengalami kerusakan bahkan ada yang menglami longsor	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten - Persentase Aksesbilitas Jalan Kabupaten Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik - Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir - Indeks Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	Persen	100	100	3.699.681.084	560.981.747		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	Orang	310	310	2.125.609.034	434.677.905		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	Aplikasi	1	1	880.540.910	43.815.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang sudah diterbitkan	Buah	1	1	274.362.500	14.240.000		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Tertib Pengawasan, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Perusahaan	25	25	419.168.640	68.248.842		
4. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	93,58	81,1	129.048.086.605	94.127.204.253	1. Pihak Eksternal ket:1. verifikasi BNBA yang belum valid	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	Persen	1,26	85,71				
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Paket	4	4	129.048.086.605	94.127.204.253	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	88,3	107	17.384.981.047	13.616.920.210	1. Pihak Eksternal ket:Kerbatasan Kapasitas SDM serta Faktor eksternal seperti cuaca buruk dan kondisi sosial ekonomi	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat / Terpusat	Unit	51	295	17.384.981.047	13.616.920.210		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	97,39	89.449.804.667	79.718.971.967	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perlunya dukungan anggaran untuk pelatihan,pembinaan dan pengembangan Kapasitas SDM	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	506.075.500	109.193.801		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	66.052.930.096	64.775.840.091		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	106.138.000	81.968.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan Kapasitas SDM dapat Menghambat Pengelolaan BMD	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	231.608.000	76.215.600		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	4.477.750.707	2.716.107.772		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	10	10	984.087.000	208.189.889		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	8.806.382.614	5.845.053.279		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	118	118	8.284.832.750	5.906.403.535		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	17.932.691.948	5.503.089.860	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum adanya Penetapan SK Bencana	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100			1. Pihak Eksternal ket:Data penerima manfaat sealul berubah-ubah	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	15	9	1.335.799.000	728.294.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kabupaten/Kota								
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Kegiatan	1	1	279.502.000	116.130.000		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/rehab	Unit	19	12	15.306.895.000	4.218.328.400		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	1	1	1.010.495.948	440.337.460		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	48,19	191,45	2.699.477.998	2.523.139.000	1. Pihak Eksternal ket:Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kualitas permukiman kumuh	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	140.028.000	66.071.000	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran yang terlambat	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	Hektar (Ha)	2	2	2.559.449.998	2.457.068.000		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak - Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,4	20,47	5.431.231.500	4.902.620.519		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	517	18,18				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang direnovasi	Unit	517	94	5.431.231.500	4.902.620.519	1. Anggaran ket:adanya pemotongan anggaran (Rasio)	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	4,29	27,97	237.751.944.316	199.940.887.753	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Menekankan pada proses sistematis keterukuran,keterlibatan pemangku kepentingan serta dasar pertimbangan seperti kondisi baseline dan kapasitas sumber daya agar tujuan dan target dpt dipantau dan dicapai secara efektif	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Persen	15,75	15,75	237.751.944.316	199.940.887.753		
5. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah - Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	82,86	30.750.839.370	26.933.577.539	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan SDM	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	26	26	543.979.475	270.477.240	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan Alokasi dan SDM	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	17	17	22.262.742.405	21.112.799.163		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	-	-		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	17	17	412.875.600	398.027.059		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	4	4	800.171.010	388.277.375		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	0	773.980.420	8.929.000	1. Anggaran ket:Anggaran Belum Tersedia	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	4.432.640.270	3.947.623.611		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	84	84	1.524.450.190	807.444.091		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah - Jumlah pelanggaran produk hukum daerah	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	86	100	5.219.143.075	4.591.123.556	1. Anggaran ket:Efesiensi Anggaran	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	100	100				
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan Angka Penanganan Gangguan Trantibum	Kasus	900	937	4.317.950.650	3.889.836.500		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah PERDA yang ditegakkan	PERDA	3	3	728.922.425	555.934.040	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Satuan Polisi Pamong Praja		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	Orang	3	3	172.270.000	145.353.016	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	88,29	15.961.643.197	13.737.568.641	1. Manajemen Resiko ket:Manajemen Resiko	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	83	89,16			1. Manajemen Resiko ket:Manajemen Resiko	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	617.520.800	593.262.361		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	10.097.374.770	8.735.978.270		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	39	39	131.650.000	114.723.850		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	5	1	-	-	1. Anggaran ket:Kekosongan Kas Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	100	100	642.315.800	605.423.970		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	300	71	965.446.817	432.923.793	1. Anggaran ket:Terbatasnya Transfer Anggaran Daerah	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.507.335.010	1.320.904.079		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	87	87	2.000.000.000	1.934.352.318		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Jumlah Regulasi Daerah	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	18,11	78,13	3.019.394.600	2.094.891.133	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran 2. Anggaran ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	19,55	81,59			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran 2. Anggaran ket:1. Kapasitas SDM Belum Memadai 2. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100			1. Peralatan ket:Peralatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	18,11	2,8	361.212.400	252.716.180	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal 2. Pihak Eksternal ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal 3. Anggaran ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, Koordinasi Dengan Stakeholder Lainnya Belum Optimal	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	90	1.070.602.000	686.946.802	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal 2. Pihak Eksternal ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal 3. Anggaran ket:Alokasi dan Kapasitas SDM Masih Terbatas, waktu pelaksanaan Belum Optimal	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	1.119.335.600	762.459.177	1. Peralatan ket:Peralatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	1,96	468.244.600	392.768.974		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	80,56	30.228.011.845	25.000.635.374		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	72	80,56				
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	29	237.924.544	165.193.340		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	28	28	16.563.872.583	14.002.052.288		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	9	6	35.702.500	28.670.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pengamanan BMD SKPD memerlukan dukungan alokasi kapasitas SDM	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	56	2	32.043.311	7.520.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	130	62	1.659.085.419	1.117.402.249		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	3	11,11	487.240.000	487.240.000		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	25	30,55	10.212.373.488	8.482.910.297		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	83	80	999.770.000	709.647.200		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran - Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia - Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	2.640.914.981	1.516.875.435	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Trdapat Kesalahan dalam Penentuan Target Seharusnya Satuannya adalah menit bukan persen	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) "	Kelompok	5	100			1. Anggaran ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahlian)	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahliaan) 2. Peralatan ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahliaan) 3. Anggaran ket:Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana,Personil dan Sumber Daya Manusia (Keahliaan)	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	2.202.876.210	1.239.386.535		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	103.461.274	87.601.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung 2. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai regulasi 2. Pihak Eksternal ket:1. kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung 2. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai regulasi	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen	Dokumen	1		-	-		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	310	310	147.425.334	61.916.200	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan 2. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber 2. Peralatan ket:Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan 2. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi dan Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusi	Persen	100	107,14	187.152.163	127.971.200		
6.	BIDANG SOSIAL											
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial - Nilai SAKIP	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82	89,72	14.900.500.981	12.949.197.453	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas 2. Regulasi/Peraturan ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	82	73,57	514.524.615	213.344.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas 2. Regulasi/Peraturan ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	82	73,57			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas 2. Regulasi/Peraturan ket:Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20	20	11.455.839.804	10.242.668.737	1. Anggaran ket:Keterbatasan kemampuan keuangan daerah	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	20	20			1. Anggaran ket:Keterbatasan kemampuan keuangan daerah	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	121.140.500	94.214.800	1. Anggaran ket:Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik walaupun terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4			1. Anggaran ket:Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik walaupun terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	75	56,25	19.364.800	12.078.800	1. Anggaran ket:Proses Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan dengan baik meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2			1. Pihak Eksternal ket:Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan dengan baik meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	744.861.401	662.477.673	1. Pihak Eksternal ket:Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan baik mesikpun masih bertahap di karena kondisi keuangan daerah, harus mendahulukan belanja skala prioritas yang tinggi (urgen) 2. Anggaran ket:Pelaksanaan Kegiatan masih berjalan baik mesikpun masih bertahap di karena kondisi keuangan daerah, harus mendahulukan belanja skala prioritas yang tinggi (urgen)	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	101.439.134	101.056.997	1. Anggaran ket:Pelaksanaan Kegiatan Tetap berjalan meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Bulan	12	12	1.312.888.327	1.171.130.017		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					disediakan							
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	630.442.400	452.225.929	1. Anggaran ket:Pelaksanaan Kegiatan Tetap berjalan meskipun belum maksimal terkendala kondisi keuangan daerah yang mengharuskan mendahulukan belanja skala prioritas	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	92	99,01	5.149.768.480	5.073.216.655	1. Anggaran ket:Anggaran kegiatan peningkatan SDM terfokus pada pembayaran PSM,TKSK,PUSKESOS, sehingga mencapai 99 % pembayaran jasa pergeseran anggaran mengurangi nilai makna Pengembangan SDM PSKS 2. Waktu ket:Anggaran kegiatan peningkatan SDM terfokus pada pembayaran PSM,TKSK,PUSKESOS, sehingga mencapai 99 % pembayaran jasa pergeseran anggaran mengurangi nilai makna Pengembangan SDM PSKS	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	Orang	50	50	16.006.900	12.695.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab.Kutai Kartanegara. 2. Regulasi/Peraturan ket:di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab.Kutai Kartanegara. 3. Anggaran ket:di harapkan di Buat Peraturan Daerah tentang mekanisme di sesuaikan dengan kearifan lokal di Kab.Kutai Kartanegara.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	Orang	70	70	5.133.761.580	5.060.521.655	1. Anggaran ket:Anggaran terfokus pada pembayaran SDM PUSKESOS,PSM TKSK ,	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											SDM PSKS perlu peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen publik speking dll kedepan perlu perhatian kusus	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persen	100	100	24.809.200	15.930.000		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Orang	5	5	24.809.200	15.930.000		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	83,5	4.441.865.290	3.676.728.280	1. Anggaran ket:1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti tidak dapat dilaksanakan secara Maksimal dengan berkurangnya anggaram kegiatan. 2. Untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota yang terbatas di Dinas Sosial Provinsi.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Orang	1250	1217	4.004.515.580	3.412.331.680	1. Anggaran ket:1. Pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dengan kurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota yang terbatas di Dinas Sosial Provinsi.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Orang	320	202	437.349.710	264.396.600	1. Anggaran ket:1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Tidak dapat	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial						dilaksanakan secara maksimal dengan berkurangnya anggaran kegiatan. 2. Untuk Pelayanan Rehabilitas Sosial di dalam panti belum dapat dilaksanakan karena jumlah kuota terbatas di Dinas Sosial Provinsi.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	97,83	100	5.085.831.650	4.376.732.176		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial			Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	100	97,63				
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	Orang	40	12	1.099.896.400	697.940.300	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya efisiensi Anggaran dan penagihan pembayaran belanja yang tidak lancar, serta kurangnya kapasitas penampungan.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Dokumen	2	1,99	3.985.935.250	3.678.791.876	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat. 2. Pihak Eksternal ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat. 3. Anggaran ket:Adanya efisiensi anggaran, target awal tidak sesuai karena mengacu pada DTSEN, hasil pemuktahiran data ditetapkan oleh BPS Pusat.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	1.575.822.090	757.846.110	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana 2. Pihak Eksternal ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana 3. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran, menunggu proses APBDP, kesiapan SDM yang masih rendah, Pihak eksternal dapat menghambat penanganan bencana melalui kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	KK	1500	2709	1.275.822.090	577.964.910	1. Anggaran ket:Ketiadaan Anggaran	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	Desa/Kelurahan	12	0	300.000.000	179.881.200	1. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar - Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Presentase TMP yang di kelola	Persen	100	100	1.774.204.000	1.601.242.182	1. Anggaran ket:Anggaran kurang dan pekerjaan rehab dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan masih perlu dilakukan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Lokasi	2	2	1.774.204.000	1.601.242.182		
7. BIDANG TENAGA KERJA												
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai	73	98,3	12.605.992.012	10.530.350.513	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Dokumentasi pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	460.385.021	303.429.390		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	10.164.857.601	8.960.467.581		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	1	1	81.086.000	38.760.000		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	69	95	170.643.000	93.104.792		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	2	274.535.070	244.687.805		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1	1	42.670.000	32.528.450		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	886.075.320	629.162.821		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	30	5	525.740.000	228.209.674		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	148.167.500	123.932.630	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Terlaksananya	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kerja	kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru - Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan								kegiatan	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	1	1	148.167.500	123.932.630	1. Anggaran ket:Anggaran sangat kurang untuk Pelaksanaan Penyusunan RTKD terkaid dana pendampingan dari Narasumber 2. Dukungan Pemimpin ket:Anggaran sangat kurang untuk Pelaksanaan Penyusunan RTKD terkaid dana pendampingan dari Narasumber	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing, - Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	24,34	19,68	3.143.833.400	2.910.553.348		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	3	100			1. Anggaran ket:Efisiensi	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	300	183	3.089.095.000	2.887.333.348	1. Anggaran ket:adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pembatalan beberapa program pelatihan yang telah direncanakan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk jenis pelatihan yang paling cepat memberikan peluang kerja bagi peserta	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Lembaga	11	15	15.225.850	10.060.000	1. Manajemen Resiko ket:Hambatan dalam penerapan manajemen risiko antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran organisasi terhadap pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal perencanaan kegiatan. Selain itu, belum tersedianya pedoman atau sistem yang terintegrasi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dalam pengelolaan risiko, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko, serta keterbatasan data dan informasi yang akurat turut menjadi kendala dalam penerapan manajemen risiko secara efektif.	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	25	25	15.350.150	9.990.000	1. Manajemen Resiko ket:Hambatan utama dalam pelaksanaan konsultasi ini adalah belum optimalnya penerapan manajemen risiko di tingkat perusahaan kecil. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya identifikasi risiko usaha, mitigasi, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan usaha.	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persen	25	0	24.162.400	3.170.000	1. Anggaran ket:Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengukuran produktivitas adalah terbatasnya anggaran akibat kebijakan efisiensi	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru - Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	12,35	809,72	6.594.047.540	4.566.360.044		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	Layanan	2	2	6.384.574.840	4.369.410.104	1. Peralatan ket:1. Ada beberapa item barang belum ada di SIPD karen harus diusulkan melalui Aplikasi Simaston. 2. Adanya beberapa kali Efisiensi Anggaran sehingga target berkurang 2. Regulasi/Peraturan ket:1. Ada beberapa item barang belum ada di SIPD karen harus diusulkan melalui Aplikasi Simaston. 2. Adanya beberapa kali Efisiensi Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											sehingga target berkurang	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	0	-	-	1. Anggaran ket:tidak bisa dilaksanakn	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	Event	1	1	209.472.700	196.949.940	1. Pihak Eksternal ket:Perusahaan yang belum melaporkan hasil rekrutmen kegiatan	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis - Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100	99,78	8.848.883.950	6.666.718.143	1. Anggaran ket:Karena Efisiensi	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	Perusahaan	28	43	248.792.900	158.339.310		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundang Undangan	Perusahaan	65	27	8.600.091.050	6.508.378.833		
8. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai	76,5	92,5	7.980.179.999	7.185.372.670		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	484.593.100	435.033.635		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	40	40	6.428.000.746	5.732.707.103		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	57.616.000	49.616.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	69.724.250	68.910.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	389.759.192	375.444.515		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	30	30	78.835.200	71.782.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	376.875.511	367.743.417		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	23	23	94.776.000	84.136.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22,92	100	874.299.660	818.445.871		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang dilembagakan	OPD	56	52	191.585.026	177.257.566		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Orang	28	26	394.988.734	386.866.705		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	28	26	287.725.900	254.321.600		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	734.344.020	646.217.720		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada perangkat daerah	OPD	11	11	197.565.500	143.593.248		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	Kasus	50	50	327.896.920	307.271.472		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan Perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	10	10	208.881.600	195.353.000		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	77,8	100	353.909.340	295.344.095		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Lembaga	3	3	104.620.400	79.691.915	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal 2. Waktu ket:Efisiensi Anggaran sehingga harus penyesuaian di beberapa hal	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kecamatan	2	2	249.288.940	215.652.180	1. Peralatan ket:penyesuaian efisiensi anggaran 2. Anggaran ket:penyesuaian efisiensi anggaran	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	80,77	100,28	120.731.500	120.071.400		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Dokumen	2	2	120.731.500	120.071.400		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	790	88,35	1.821.120.820	1.466.815.925		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	Lembaga	5	5	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa menginisialsi layak Anak	Desa/Kelurahan	7	7	1.821.120.820	1.466.815.925	1. Anggaran ket:efisiensi anggaran sehinggan harus dilakukan penyesuaian	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	1.690.266.179	1.488.333.265		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	Lembaga	20	20	330.705.700	247.233.553		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	Orang	100	112	938.139.899	923.742.621		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Desa	17	10	421.420.580	317.357.091		
9. BIDANG PANGAN												
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	85,65	14.658.764.757	12.222.401.143		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	16	16	572.354.600	523.816.364		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	8.913.511.589	7.614.147.417		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	67.262.000	53.816.500		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	9	198.374.000	190.299.850		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	12	12	901.745.737	808.314.854		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang	Unit	104	140	3.486.563.000	2.547.874.170		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	383.953.831	357.517.439		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	30	30	135.000.000	126.614.549		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah - Ketersediaan energi	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit	10	1,640.00	34.334.168.300	24.112.309.280	1. Waktu ket:Pelaksanaan Kegiatan Tidak tepat waktu, sehingga baru selesai di Bulan desember	
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	164	34.334.168.300	24.112.309.280		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan - Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	2200	92,5	11.870.272.000	10.021.446.138		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan			Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	57,2	110,96				
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Persen	5	5	9.242.185.600	8.092.824.120		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pangan								
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan cadangan Pangan Pemerintah	Ton	150	3	646.113.000	166.070.200	1. Regulasi/Peraturan ket:karena belum adanya regulasi, jadi kegiatan tidak bisa secara keseluruhan dilaksanakan	
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kelompok	30	30	1.981.973.400	1.762.551.818		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah - Ketersediaan energi	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	Desa	5	360	2.287.948.100	1.922.050.208		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	1	205.644.000	178.380.417		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	Desa/Kelurahan	5	5	2.082.304.100	1.743.669.791		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan - Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	92	103,26	843.615.000	634.656.863		
	BIDANG PANGA	Dinas Ketahanan Pangan		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat	Persen	92	95	843.615.000	634.656.863		
10. BIDANG PERTANAHAN												
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang - Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	80	100	3.015.700.060	2.510.502.613	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Penyesuaian Target/Output Terkait Pengurangan anggaran	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persen	4	4	1.667.322.880	1.519.517.400		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persen	27,29	14,6	406.187.000	210.308.607	1. Anggaran ket:ketersediaan kas daerah terbatas	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persen	5,03	5,03	318.695.300	210.501.985		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persen	3,77	3,77	623.494.880	570.174.621		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	100	18.427.686.274	16.244.122.495	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kuranganya Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia senhingga menghambat kemampuan pegawai dalam pengelolaan SAKIP. 2.Perubahan kebijakan pada implementasi SAKIP 2. Regulasi/Peraturan ket:Kuranganya Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia senhingga menghambat kemampuan pegawai dalam pengelolaan SAKIP. 2.Perubahan kebijakan pada implementasi SAKIP	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	570.816.400	386.130.412		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	10.551.148.578	9.480.884.103		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	92.581.970	38.703.700		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	664.014.280	430.462.866	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran yang tersedia	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	749.403.938	682.265.451	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten 2. Penggunaan aplikasi e-purchasing atau e-catalog yang belum optimal (Versi 6) 3. Ketersediaan Anggaran Dana Kas Daerah yang tidak menentu	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Regulasi/Peraturan ket:1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten 2. Penggunaan aplikasi e-purchasing atau e-catalog yang belum optimal (Versi 6) 3. Ketersediaan Anggaran Dana Kas Daerah yang tidak menentu 3. Anggaran ket:1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten 2. Penggunaan aplikasi e-purchasing atau e-catalog yang belum optimal (Versi 6) 3. Ketersediaan Anggaran Dana Kas Daerah yang tidak menentu	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	18	78	2.416.407.000	2.252.020.748	1. Anggaran ket:Ketersediaan Dana/Anggaran Daerah yang tidak menentu pada APBD Perubahan 2025	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.236.475.108	2.018.304.660		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12	12	1.146.839.000	955.350.555		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	Persen	95	100	601.530.500	568.521.100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik. 3. Manajemen Resiko ket:Sengketa tanah garapan melibatkan banyak pihak dan emosi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terbuka jika tidak ditangani dengan pendekatan komunikasi dan pengelolaan risiko sosial	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang baik. (2) Petugas mediasi di tingkat desa/kecamatan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam teknik mediasi yang efektif dan netral. (3) Sistem pengelolaan kasus masih manual, belum tersedia Sistem Informasi Rekapitulasi Data Pengaduan Kasus Tanah yang mendukung pelacakan dan penanganan berbasis data. (4) Ketergantungan pada kehadiran dan komitmen pihak luar (masyarakat, badan hukum, atau instansi) yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi hambatan saat proses mediasi tidak direspons dengan baik.	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	601.530.500	568.521.100	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cendrung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 2. Peralatan ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cendrung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 3. Pihak Eksternal ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cendrung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 4. Anggaran ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cendrung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public 5. Waktu ket:Beberapa SDM dibidang tidak memahami tupoksinya / kinerjanya terhadap beberapa dumas dan klaim lahan aset pemda, cendrung diam atau menghindar dalam pelayanan, ketidak ketersediaannya anggaran, menghambat tahapan proses dan waktu jadi berubah semua, pihak pengguna tanah aset pemda tidak kooperatif, mungkin karena menganggap bukan tupoksinya sehingga koordinasi jadi molor. pelayanan publik jadi tidak maksimal, infrastruktur pelayanan kurang dalam mendukung tupoksi dalam pelayanan public	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	85	76,47	21.549.494.120	15.511.538.995	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Data dan lokasi yang disampaikan OPD yang memerlukan tanah kurang lengkap dan lokasi yang ditetapkan belum ada kepastian.	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	8	7	21.549.494.120	15.511.538.995	1. Pihak Eksternal ket:Sengketa Waris dan kurangnya respon OPD yang memerlukan tanah	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	Persen	95	100	442.738.020	243.908.650	1. Regulasi/Peraturan ket:- Diakhir tahun kepastian pembayaran 2. Anggaran ket:- Diakhir tahun kepastian pembayaran	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian	Dokumen	4	4	345.100.020	175.455.650		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah kebelbihan maksimum							
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	97.638.000	68.453.000		
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persen	60	10,03	135.082.950	15.146.200	1. Regulasi/Peraturan ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar 2. Pihak Eksternal ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:- belum ada kejelasan batas batas tanah adat yang dikuasai MHA, belum ada Kajian dari BRIDA dan pihak lain terkait adanya tanah ulayat di Kukar	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	Dokumen	3	1	135.082.950	15.146.200	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat 2. Pihak Eksternal ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Belum ada kejelasan batas tanah adat yang akan diajukan menjadi tanah ulayat	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	70	94,29	411.662.306	254.330.087	1. Pihak Eksternal ket:Lahan dalam sengketa - Lokasi masuk di dalam HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi - Pajak PBB belum ada - Batas tanah belum jelas -	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Yang Bersertifikat								Kendaraan Operasional tidak ada	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	Dokumen	1	1	48.092.000	27.919.800	1. Pihak Eksternal ket:dokumen kelengkapan pembebasan asset daerah tidak lengkap/ tidak ada, patok batas bidang tidak ada 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:dokumen kelengkapan pembebasan asset daerah tidak lengkap/ tidak ada, patok batas bidang tidak ada	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kegiatan	2	2	363.570.306	226.410.287	1. Pihak Eksternal ket:Anggaran untuk kegiatan belum tersedia untuk penaganan lahan dalam sengketa lokasi masuk HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi Pajak PBB belum ada batas tanah belum jelas Kendaraan Operasioanal tidak ada 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Anggaran untuk kegiatan belum tersedia untuk penaganan lahan dalam sengketa lokasi masuk HGU, WKP Pertamina, HPL Transmigrasi Pajak PBB belum ada batas tanah belum jelas Kendaraan Operasioanal tidak ada	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan - Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	85	100	685.310.206	656.265.225	1. Regulasi/Peraturan ket:1) Tenaga teknis di desa/kecamatan dan dinas masih terbatas dalam memahami mekanisme IMT, verifikasi lapangan, dan penyusunan berita acara penetapan. (2) Masih ada kekhawatiran bahwa penerapan IMT bisa memicu konflik pertanahan atau protes masyarakat jika tidak didahului dengan sosialisasi dan mitigasi risiko. (3) Ketergantungan pada instansi lain (BPN, kecamatan, desa, perusahaan pemegang izin	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											HGU/IUP) dalam penyediaan data atau kesepakatan, bisa menjadi hambatan bila koordinasi lemah. (4) Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data. 2. Pihak Eksternal ket:1) Tenaga teknis di desa/kecamatan dan dinas masih terbatas dalam memahami mekanisme IMT, verifikasi lapangan, dan penyusunan berita acara penetapan. (2) Masih ada kekhawatiran bahwa penerapan IMT bisa memicu konflik pertanahan atau protes masyarakat jika tidak didahului dengan sosialisasi dan mitigasi risiko. (3) Ketergantungan pada instansi lain (BPN, kecamatan, desa, perusahaan pemegang izin HGU/IUP) dalam penyediaan data atau kesepakatan, bisa menjadi hambatan bila koordinasi lemah. (4) Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data.	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	2	2	685.310.206	656.265.225	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr 2. Peralatan ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr 3. Regulasi/Peraturan ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr 4. Waktu ket:IKU dalam laporan LPPD selama ini, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah untuk masyarakat berdasarkan Izin Membuka Tanah (IMT) Yang diberikan tidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pernah diperoleh, karena tidak bisa dilaksanakan dan tidak sedia petunjuk teknis dan kejelasan objek dan subjek untuk pemberian izin membuka tanah yang sifatnya local baik ditingkat desa kecamatan dan dinas ; (2) untuk pemenuhan IKU tersebut tidak regulasi/peraturan daerah yang sesuai dengan Kepres no. 34 Tahun 2003 dan SK. BPN No. 2 Tahun 2003, sementara regulasi yang IMTN yang ada Perda No. 2 Tahun 2017 (inisiasi DPRD) baru diketahui OPD DPPR Desember tahun 2023 pemenuhan LPPD dan seiring perubahan Tupoksi DPPR melalui Perbup. no.63 tahun 2023 ; (3) Karena Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang IMTN, tidak selaras dengan peraturan diatasnya, sehingga pelaksanaan tidak dapat dilakukan, sehingga diperlukan proses legal reviu dan regulasi baru serta diperlukan objek tanah negara yang diusulkan menjadi penetapan objek tanah negara untuk pertanian, yang diluar dari kawasan hutan, diluar Hak Atas Tanah (sertipikat), diluar tanah aset pemerintah, diluar fasum dan fasos; (4) tersedia SDM tapi tidak maksimal. kemudia tidak supportnya anggarran urusan pertanahan baik ditingkat desa /Kelurahan dan kecamatan. seolah olah bukan kewajiban untuk menghimpun, mengolah dan melaporkan sekda melaui opda urusan pertanahan/ dppr	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	Persen	79	87,08	290.689.400	275.383.350	1. Peralatan ket:sarana mobilitas / ketersedian kendaraan lapangan yang siap untuk	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			pertanahan - Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat								medan sulit tidak tersedia, - alat pendukung kerja untuk pengolahan data masih kurang	
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	3	3	290.689.400	275.383.350	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisesnsi dibutuhkan 2. Peralatan ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisesnsi dibutuhkan 3. Pihak Eksternal ket:SDM teknis masih diperlukan - Peralatan penunjang masih diperlukan - penyediaan percepatan target kerja oleh tenaga pihak ketiga yang berlisesnsi dibutuhkan	
11.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,56	109,75	35.668.167.012	29.934.608.271	1. Anggaran ket:Adanya Efesiensi anggaran di Triwulan IV	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	508.468.740	440.134.777	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas,adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											baru,penggunanaan data yang tidak lengkap dan akurat. 2. Peralatan ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas,adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang baru,penggunanaan data yang tidak lengkap dan akurat. 3. Regulasi/Peraturan ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas,adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang baru,penggunanaan data yang tidak lengkap dan akurat. 4. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas,adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang baru,penggunanaan data yang tidak lengkap dan akurat. 5. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas,adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang baru,penggunanaan data yang tidak lengkap dan akurat. 6. Dukungan Pemimpin ket:Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan , kurang nya komitmen dan akuntabilitas,adanya resistensi untuk meng adopsi metode yang baru,penggunanaan data yang tidak lengkap dan akurat.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	1	17.635.314.446	15.912.548.993		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	2	2	65.878.000	36.010.000	1. Peralatan ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 2. Regulasi/Peraturan ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 3. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 4. Anggaran ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											koordinasi dengan Lembaga. 5. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 6. Manajemen Resiko ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya koordinasi dengan Lembaga. 7. Waktu ket:Keterbatasan sumber daya manusia dengan jumlah personil yang berdedikasi khusus administrasi BMD masih rendah.Sistim pencatatan yang digunakan belum terhubung dengan SIMDA BMD pusat. birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pelaporan.Kurangnya koordinasi dengan Lembaga.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase Wajib Retribusi Daerah yang Diadministrasikan	Persen	100	0	-	-	1. Anggaran ket:adanya efesiensi anggaran sehingga anggaran kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dan akan di alihkan pagu anggaran nya pada sub kegiatan lain pada renja perubahan	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	96.986.680	76.772.599	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kualitas SDM aparatur yang masih	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											rendah,kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin.pengelolaan data kep[egawaian yang tidak baik ,tidak akurat dan terintegritasi.dukungan pimpinan yang kurang.keterbatasan anggaran unmtuk pengembangan sistem dan SDM.Pelayanan publik tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal. 2. Regulasi/Peraturan ket:Kualitas SDM aparatur yang masih rendah,kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin.pengelolaan data kep[egawaian yang tidak baik ,tidak akurat dan terintegritasi.dukungan pimpinan yang kurang.keterbatasan anggaran unmtuk pengembangan sistem dan SDM.Pelayanan publik tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal. 3. Pihak Eksternal ket:Kualitas SDM aparatur yang masih rendah,kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin.pengelolaan data kep[egawaian yang tidak baik ,tidak akurat dan terintegritasi.dukungan pimpinan yang kurang.keterbatasan anggaran unmtuk pengembangan sistem dan SDM.Pelayanan publik tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal. 4. Anggaran ket:Kualitas SDM aparatur yang masih rendah,kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin.pengelolaan data kep[egawaian yang tidak baik ,tidak akurat dan terintegritasi.dukungan pimpinan yang kurang.keterbatasan anggaran unmtuk pengembangan sistem dan SDM.Pelayanan publik	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal. 5. Manajemen Resiko ket:Kualitas SDM aparatur yang masih rendah,kurangnya pelatihan dan rendahnya disiplin.pengelolaan data kep[egawaian yang tidak baik ,tidak akurat dan terintegritasi.dukungan pimpinan yang kurang.keterbatasan anggaran unmtuk pengembangan sistem dan SDM.Pelayanan publik tidak optimal.kinerja pegawai tidak maksimal.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.235.162.866	1.687.414.281	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil. 2. Regulasi/Peraturan ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil. 3. Anggaran ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil. 4. Waktu ket:Kualitas SDM Aparatur yang tidak kompeten,tidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											profesional dan tidak memiliki integritas.sistem dan prosedur tidak terlaksana dan tidak jelas untuk mendorong kelancaran tugas.budaya kerja yang kurang baik yang tidak fokus pada hasil.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	65,5	65,5	10.602.943.928	9.693.271.850	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 2. Peralatan ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 3. Regulasi/Peraturan ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 4. Pihak Eksternal ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal 5. Anggaran ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											proses menjadi tidak optimal 6. Waktu ket:SDM kurang kompeten, pemahaman regulasi lemah, kendala administrasi dan inventarisasi, penilaian aset tidak akurat yang semuanya menyebabkan proses menjadi tidak optimal	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.457.733.379	1.826.740.574		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	65,5	65,5	1.712.730.000	261.715.197	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara. 2. Peralatan ket:Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara. 3. Regulasi/Peraturan ket:Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara. 4. Pihak Eksternal ket:Sumber daya manusia	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara. 5. Anggaran ket:Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara. 6. Manajemen Resiko ket:Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara. 7. Waktu ket:Sumber daya manusia yang pemahaman regulasi kometensi dan kesadaran masih rendah,ketidsesuaian antara regulasi dan praktek di lapangan.kelemahan sitem inpenterisasi dan pencatatan.kendala infra struktur dan anggaran yang menyebabkan aset tidak tepelihara.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	50	253.797.520	239.709.200	1. Pihak Eksternal ket:Dokumen DIKPLHD telah disusun tetapimasih belum Final dikarenakan masih menunggu terselesainya proses input data pada aplikasi IKLH	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)									
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	2	1	253.797.520	239.709.200	1. Pihak Eksternal ket:Dokumen IKLH telah disusun tetapi masih belum Final dikarenakan masih menunggu terselesainya proses input data pada aplikasi IKLH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	Dokumen			-	-		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	200000	0,29	2.399.969.399	1.549.635.152	1. Regulasi/Peraturan ket:1.Bahwa lahan yang akan ditanami seluas 9,8 Ha tidak dapat di tanami,sehingga BPDAS meminta mengajukan permohonan relokasi seluas 9,8 Ha. 2.Karena adanya relokasi pembelian bibit mangrove sejumlah 16.500 pot dibatalkan dan di ganti dengan tanaman buah buahan 3.Diakibatkan Efesiensi maka pengurangan anggaran menjadi Rp.84.140,000,- dan ini juga dilakukan anggaran perubahan bulan desember yang memperpendek pengadaan barang dan jasa sejumlah 580 bibit tanaman dengan realisasi pagu anggaran Rp. 43.800,000,-	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	4	1.417.878.339	1.015.336.552		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	295.789.800	64.985.000		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	686.301.260	469.313.600	1. Pihak Eksternal ket:Untuk kegiatan rehabilitasi adanya rekomendasi dari BPDAS	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Mahakam Berau terkait lahan yang digunakan masyarakat sebagai lahan tambak ikan untuk penanaman mangrove dilahan rehab DAS.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	20	100	3.236.304.662	2.512.090.900		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tercapainya Penanaman dan Pemeliharan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	24,19	24,19	3.236.304.662	2.512.090.900		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Tercapaianya Pengayaan Pengelolaan Kebun Raya	Persen	34	17			1. Anggaran ket:Dikarenakan keterlambatan ketersediaan Kasda sehingga Pengadaan Bibit gagal dilaksanakan	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	2	2				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	3	66,67	191.243.320	166.908.480	1. Anggaran ket:Adanya Efesiensi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan seminar tekhnis pada pelaku usaha tidak bisa di laksanakan.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku Usaha	50	66,67	53.740.520	29.955.520	1. Pihak Eksternal ket:SDM Kopetensi Terbatas	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku Usaha	50	50	137.502.800	136.952.960	1. Pihak Eksternal ket:SDM Kopetensi terkendala	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kehutanan										
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	129,4	288.383.800	232.067.733	1. Anggaran ket:Anggaran yang tersedia sangat minim yang mengakibatkan jumlah target tidak sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan	Persen	20	25	288.383.800	232.067.733	1. Anggaran ket:anggaran yang tersedia sangat minim yang mengakibatkan jumlah target tidak sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	75	100	43.548.900	42.245.300	1. Regulasi/Peraturan ket:belum ada nya regulasi yang menyebabkan belum adanya penetapan MHA PPLH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	75	75	23.788.900	23.555.900	1. Regulasi/Peraturan ket:belum adanya regulasi yang menyebabkan belum adanya penetapan MHA PPLH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	Persen	70	70	19.760.000	18.689.400	1. Regulasi/Peraturan ket:Belum adanya regulasi mengakibatkan tidak adanya penetapan MHA sehingga pembinaan yang dilakukan tidak dilakukan secara masif	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Lembaga	35	91,43	232.345.260	113.584.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya regulasi Efesiensi anggaran mengakibat kan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			(IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**UNTUK MASYARAKAT**							sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan RENJA. selain itu dengan adanya effesiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang di lakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen.selain effesiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga di ragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas sub kegiatan yang di laksanakan dan besaran persentase yang di laksanakan. 2. Anggaran ket:Adanya regulasi Efesiensi anggaran mengakibat kan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan RENJA. selain itu dengan adanya effesiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang di lakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen.selain effesiensi dana yang tersedia di Pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga di ragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas sub kegiatan yang di laksanakan dan besaran persentase yang di laksanakan.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	35	22	232.345.260	113.584.000	1. Regulasi/Peraturan ket:adanya regulasi effisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Daerah Kabupaten/Kota							sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan Renja. selain itu dengan adanya effisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen. selain efisiensi dana yang terseida di pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga diragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas subkegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan 2. Anggaran ket:adanya regulasi effisiensi anggaran mengakibatkan tidak masifnya pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RENSTRA dan Renja. selain itu dengan adanya effisiensi terjadi kesalahan dalam perubahan target sehingga untuk sekolah yang dilakukan penyuluhan/pembinaan tidak dapat 100 persen. selain efisiensi dana yang terseida di pemkab juga tidak pasti ketersediaannya sehingga diragukan akan dilakukan pembayaran hal ini berdampak dilakukannya evaluasi terhadap prioritas subkegiatan yang dilaksanakan dan besaran persentase yang dilaksanakan	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	5	100	560.324.000	176.723.116		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			(IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)									
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	129	100				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Jenis	2	2	560.324.000	176.723.116	1. Regulasi/Peraturan ket:adanya regulasi efisiensi mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pemberian penghargaab ini terutama untuk program Desa Ramah Lingkungan tidak dilakukan Penilaian karena efisiensi dan adanya ketidak pastian anggaran 2. Anggaran ket:adanya regulasi efisiensi mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pemberian penghargaab ini terutama untuk program Desa Ramah Lingkungan tidak dilakukan Penilaian karena efisiensi dan adanya ketidak pastian anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani	Persen	98	100	113.631.600	104.464.400		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Ditindaklajuti	Laporan	40	32	113.631.600	104.464.400	1. Anggaran ket:adanya efisiensi anggaran mengakibatkan tidak semua aduan asyarakat dapat terlayani secara maksimal	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	0	50.667.595.838	40.346.410.724		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kehutanan	pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)									
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Timbulan sampah	Persen	99,52	71,34			1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang ditangani	Persen	71	50,41	50.667.595.838	40.346.410.724	1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	28,3	7,2			1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Persentase cakupan area pelayanan	Persen	72,22	52			1. Anggaran ket:Adanya beberapa kegiatan dalam penyelesaian administrasi pencairan terhambat karena Alokasi anggaran	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen			-	-		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen						
12. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	86,72	16.053.974.255	13.371.815.204	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN PENCATATAN SIPIL	Sipil	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	**DAERAH KABUPATEN/KOTA**							Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	187.022.800	165.323.230		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	10.457.967.815	8.982.244.404		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	66.948.400	22.120.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	64.000.000	47.890.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	2.824.733.238	2.690.294.518		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	95	42	1.403.480.000	495.152.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.000.412.002	931.615.052		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	9	1	49.410.000	37.176.000		
	BIDANG ADMINISTRASI	Dinas Kependudukan	Meningkatnya Pemenuhan	**PROGRAM PENDAFTARAN**	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	100,73	364.964.400	222.925.172	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	dan Catatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	**PENDUDUK**							Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	87,04				
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbutkan	Dokumen	200002	200002	364.964.400	222.925.172		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	100,34	344.020.700	257.318.610	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non-Muslim	Persen	99	67,42				
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	101,01				
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Dokumen	1501	1501	292.560.700	243.828.610		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Dokumen Akta Perkawinan Non-Muslim yang diterbitkan	Laporan	1	1	51.460.000	13.490.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	117.125.400	86.711.388		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	12	11	76.810.200	48.251.388	1. Anggaran ket:Anggaran Tidak tersedian di karenakan di rasionalisasi	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jam	1	0	-	-	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:-	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Laporan	1	1	40.315.200	38.460.000	1. Anggaran ket:Anggaran Tersedia Kurang	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	31.515.000	25.470.000		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Dokumen	2	2	31.515.000	25.470.000		
13.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	75	104,87	26.706.689.801	21.179.739.144	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurang kapasitas SDM dan komitmen seluruh ASN untuk optimalisasi terhadap tindak lanjut hasil LHE	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											AKIP	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	451.582.870	376.198.632		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan yang akuntabel	Laporan	12	12	15.070.423.977	14.162.415.993	1. Anggaran ket:Secara fisik prosentase pekerjaan sudah mencapai 93.15% namun realisasi keuangan hanya menunggu kas daerah dikarenakan transfer keuangan dari pusat belum terrealisasi 100% 2. Waktu ket:Secara fisik prosentase pekerjaan sudah mencapai 93.15% namun realisasi keuangan hanya menunggu kas daerah dikarenakan transfer keuangan dari pusat belum terrealisasi 100%	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	10	10	84.143.600	62.380.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pengadaan, penghapusan serta Pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, serta pembayaran honor Pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 2. Regulasi/Peraturan ket:Pengadaan, penghapusan serta Pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, serta pembayaran honor Pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 3. Anggaran ket:Pengadaan, penghapusan serta	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Pemeliharaan barang milik daerah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada, serta pembayaran honor Pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	40	40	47.517.400	46.802.550		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	76,27	76,27	9.587.738.550	5.256.470.791	1. Anggaran ket:Kas Daerah tidak mencukupi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	233.610.250	233.106.100		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	945.107.354	851.823.120		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	23	23	286.565.800	190.541.958		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Prosentase Desa Yang Memiliki Tata Ruang Desa	Persen	25,91	77,19	67.794.025.068	67.243.243.600	1. Anggaran ket:Adanya Rasionalisasi Anggran sehinga target yang direncanakan tidak terpenuhi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaran penataan desa	Desa	27	27	67.794.025.068	67.243.243.600	1. Anggaran ket:Ada 3 Kegiatan yang mendapatkan Rasionalisasi Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capian kegiatan	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100	100	247.808.800	130.291.400		
	BIDANG PEMBERDAYAAN	Dinas Pemberdayaan		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	Desa	52	52	247.808.800	130.291.400		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	MASYARAKAT DAN DESA	Masyarakat dan Desa										
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	90	100	19.521.740.892	18.575.651.032	1. Pihak Eksternal ket:Pihak Ekternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat 2. Anggaran ket:Pihak Ekternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat 3. Waktu ket:Pihak Ekternal, Anggaran dan Keterbatasan waktu dapat sebagai faktor penghambat	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10	692,2			1. Pihak Eksternal ket:Masih terdapat Bumdes yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 2. Anggaran ket:Masih terdapat Bumdes yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 3. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Masih terdapat Bumdes yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Desa	193	193	19.521.740.892	18.575.651.032	1. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan anggaran dan Pihak Eksterenal dapat sebagai faktor penghambat 2. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran dan Pihak Eksterenal dapat sebagai faktor penghambat	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Posyandu Aktif	Persen	70	142,86	4.604.672.998	3.605.402.703	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Tidak ada referensi Posyandu Aktif	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100			1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Tidak adanya referensi tentang penilaian lembaga	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kemasyarakatan aktif	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	Lembaga	4721	7720	4.604.672.998	3.605.402.703	1. Regulasi/Peraturan ket:Tidak adanya referansi tentang penilaian Lembaga Kemasyarakatan Aktif	
14.BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62	104,48	11.088.261.612	9.085.929.265		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat	Persen	100	82			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pengembalian secara mencicil	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP	Persen	100	100				
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100				
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100				
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Rata-Rata	73,61	97,81			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Belum sepenuhnya ASN memahami dan patuh tentang pentingnya arsip	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga			Persentase Pengelolaan, Penataan,Penertiban dan Penelusuran Aset Daerah	Persen	100	100			1. Anggaran ket: Tidak tersedianya anggaran di OPD	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BERENCANA	Berencana										
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	177	177	970.673.940	823.337.987		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	7.799.272.964	6.711.366.639		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	215.000.000	194.126.000		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	68	0	296.373.000	-	1. Anggaran ket:Tidak tersedianya Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	42	30	478.033.200	367.915.967	1. Anggaran ket:Kegiatan tidak bisa dilaksanakan terhambat Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	23	23	172.582.000	111.754.350	1. Anggaran ket:Efesiensi Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.123.296.508	866.429.112	1. Anggaran ket:Pembayaran rutin dilaksanakan sebelum tanggal 20 bulan berjalan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	95	95	33.030.000	10.999.210	1. Anggaran ket:Efesiensi Anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK - Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	45	129,33	2.668.025.380	2.092.865.693		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	000	0,01	148.077.680	131.860.750		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	70	58,21	2.519.947.700	1.961.004.943	1. Waktu ket:teidak dapat memaksimalkan waktu yang tersedia	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun - Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 tahun)	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,22	90,65	5.254.307.189	4.934.905.341	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran untuk distribusi alokon, sehingga hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan alokon di beberapa wilayah tertentu	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,5	28,76			1. Dukungan Pemimpin ket:Kurangnya pemahaman tentang capaian Unmeet Need : dimana target OPD yang seharusnya capaian yang lebih rendah akan lebih baik, dan bukan dipahami sebaliknya.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Meningkatnya Peserta KB Baru	Persen	15	106,53			1. Anggaran ket:Keterbatasan dalam penganggaran yang tersedia	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Menurunnya angka Drop Out (DO)	Persen	11,67	26,91			1. Peralatan ket:Tidak adanya data dukung yang valid dalam menyusur data DO	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Meingkatnya akseptor MKJP	Persen	17,03	115,91			1. Anggaran ket:Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk mobilisasi petugas.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegitaan advokasi dan KIE	Event	5	5	2.675.254.429	2.500.648.241	1. Anggaran ket:Ket : tersendatnya pencaiaran, sehingga kegiatan harus didahulukan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Desa	237	236	656.580.000	656.305.000		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Fasilitasi Kesehatan	40	38	1.133.188.160	1.122.427.190	1. Regulasi/Peraturan ket:Ket : ada keterlambatan pada tahapan klaim pencairan kegiatan dikarenakan terdapat regulasi perubahan RKA menjadi RKA-P, sehingga juga menghambat proses pencairan belanja kegiatan berjalan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA	Persen	75	74	789.284.600	655.524.910	1. Anggaran ket:Ket : Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan Pembinaan Kader, sehingga anggaran kegiatan tersebut di nihilkan, dan hanya kegiatan penggerakan kader saja yang dapat berjalan 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Ket : Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan Pembinaan Kader, sehingga anggaran kegiatan tersebut di nihilkan, dan hanya kegiatan penggerakan kader saja yang dapat berjalan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan keluarga - Indek Pembangunan Keluarga	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	65,31	148,52	4.888.299.900	4.349.637.895	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan pembinaan dan kapasitas SDM kader BKB	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84,98	101,41			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan sumberdaya di lapangan	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	61,32	133,19			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya frekuensi pembinaan dan terbatasnya kapasitas kader BKL.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	7	438,14			1. Peralatan ket:Kurangnya sarana prasarana pengelola PPKS dalam pelaksanaan kegiatan.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	88,89	118,88			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya advokasi, frekuensi pembinaan serta keterbatasan sumberdaya dilapangan.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	70,26	111,97			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya frekuensi pembinaan dan keterbatasan SDM kader UPPKS	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	37,2	80,83	1.663.278.200	1.235.206.395	1. Anggaran ket:Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	80	69,4	3.225.021.700	3.114.431.500	1. Anggaran ket:Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran	
15.BIDANG PERHUBUNGAN												
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur - Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	82	88,7	44.671.495.007	40.600.515.453		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	100	100	939.438.861	573.963.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	20.769.041.190	19.228.321.237		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	212.140.223	160.481.896		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	585.489.072	518.593.580		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	2.401.279.700	1.669.668.027		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	348.805.573	327.922.196		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	17.099.752.679	16.586.875.569		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	2.315.547.709	1.534.689.948		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan - Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	32,41	84,36	158.584.157.966	134.303.277.966	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mengakibatkan utang	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Persen	100	100	94.448.613.259	76.196.522.332		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Persen	100	100	1.240.927.981	577.251.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Persen	100	100	680.900.377	402.608.167		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Jumlah Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Persen	100	100	1.562.903.013	1.545.734.620		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	58.118.225.259	54.003.262.222		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penilaian Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen	84	84	56.706.078	29.524.998		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	84	0	53.967.200	-		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	2.319.979.569	1.472.819.867		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Persen	100	100	101.935.230	75.554.760		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan - Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal - Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Persen	52	61,96	3.224.137.231	2.078.330.233	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mengakibatkan utang	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan DLKR/DLKP di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	100	99.644.251	48.206.720		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	100	189.068.872	185.328.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Persen	100	100	2.848.263.627	1.760.115.513		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Danau								
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Pengeloaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	100	100	87.160.481	84.680.000		
16.BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE - Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88	87,35	26.110.318.014	23.169.943.882	1. Peralatan ket:Belum optimalnya dokumentasi kegiatan untuk data dukung penilaian AKIP	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	10	383.972.000	259.969.200		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	10.213.388.665	9.308.272.601		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100.197.200	96.575.400		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	508.787.500	460.668.077		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	5	5	2.034.941.720	1.638.529.728		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	1.129.649.000	1.094.979.854		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	10.963.074.049	9.635.131.069		
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	100	6	776.307.880	675.817.953	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya Efisiensi Anggaran dari Pemerintah Pusat	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Anggaran ket:Adanya Efisiensi Anggaran dari Pemerintah Pusat	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE - Indeks Domain Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	86.133.178.400	59.196.182.437	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Angkas	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Informasi dan Komunikasi Publik	840	840	86.133.178.400	59.196.182.437	1. Anggaran ket:Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Angkas	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE - Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	84.935.867.135	75.854.328.179	1. Waktu ket:Adanya Efisiensi Anggaran Sehingga kurangnya optimalisasi kegiatan	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD	OPD	56	56	84.935.867.135	75.854.328.179		
17.BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM - Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	86,14	12.154.549.605	10.145.834.790	1. Anggaran ket:realisasi anggaran membuat beberapa sub kegiatan mengalami pengosongan anggaran, serta penurunan anggaran dan target.	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	342.856.622	164.706.600		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	9.340.786.510	8.446.450.597	1. Anggaran ket:Rasionalisasi anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	99.538.868	52.260.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Pada Perpres 72 tahun 2025. Terdapat perubahan regulasi teang satuan harga honor Pengguna Barang, Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, Pengrus barang pembatu.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Regulasi / peraturan	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	100	100	548.454.063	462.586.482		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	203.123.000	166.093.675		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	597.588.664	451.535.854		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	1.022.201.878	402.201.582		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	23,35	98,5	605.974.921	507.501.164	1. Regulasi/Peraturan ket: Dengan adanya inpres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP / KKMP sehingga sasaran koperasi konvensional terkendala dan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana. 2. Pihak Eksternal ket: Dengan adanya inpres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP / KKMP sehingga sasaran koperasi konvensional terkendala dan target yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana.	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	75,88	80	605.974.921	507.501.164		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	Persen	14,81	173,73	684.875.600	574.408.790	1. Anggaran ket:Minimnya anggaran mengingat masih terdapat jumlah sasaran yang belum dapat dilakukan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											penilaian kesehatan	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Unit	170	50	684.875.600	574.408.790		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Pengurus dan Pengawas yang Memiliki Sertifikasi Pelatihan Perkoperasian	Persen	100	100	76.577.169	29.573.900	1. Peralatan ket: kurangnya jaringan internet	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Unit	60	31	76.577.169	29.573.900		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi Aktif	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Meningkatnya Aset Koperasi	Persen	3,89	77,12	720.122.937	482.908.054		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			Persentase Meningkatnya Volume Usaha (Omzet) Koperasi	Persen	3,89	123,65				
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Unit	55	150	720.122.937	482.908.054		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru - Persentase Pertumbuhan wirausaha	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	1,99	45,73	3.184.681.946	1.983.526.435	1. Anggaran ket:Kebijakan Rasionalisasi Dan Efesiensi Anggaran yang berakibat pada Realisasi tidak memenuhi target	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di berdayakan	UMKM	1121	1188	3.184.681.946	1.983.526.435		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru - Persentase	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Pertumbuhan Omzet UMKM	Persen	1,14	74,56	3.381.990.877	3.142.575.299	1. Anggaran ket:Kebijakan Rasionalisasi Dan Efesiensi Anggaran yang berakibat pada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pertumbuhan wirausaha								Relisasi tidak memenuhi target	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan UMKM	UMKM	320	286	3.381.990.877	3.142.575.299		
18. BIDANG PENANAMAN MODAL												
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	94,9	82,76	16.386.169.136	14.696.635.367	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	19	19	565.569.593	468.864.104		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	10.997.224.634	9.996.315.205		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	Dokumen	3	3	204.211.310	96.017.736		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	13.201.340	13.201.000		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	252.968.760	149.414.865		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	Persen	100	100	1.116.077.859	1.088.684.800		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	20	100	299.101.000	290.084.100		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	Persen	100	100	1.815.984.640	1.630.497.817		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	Unit	108	108	1.121.830.000	963.555.740		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Proyek	665	550,38	1.717.281.800	1.679.913.709	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA	1	1	240.861.000	215.497.904		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	Dokumen	3	3	1.476.420.800	1.464.415.805		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	340	58,82	1.098.959.200	940.463.107	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	340	200	1.098.959.200	940.463.107		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah Penerbitan izin	Izin	12500	106,35	846.643.775	455.605.632	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92	96,51	846.643.775	455.605.632		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	Persen	30,75	0	619.102.773	592.187.535	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) - Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMDN/PMA	Perusahaan	1020	443	619.102.773	592.187.535		
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	100	511.315.200	153.482.357	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	3	511.315.200	153.482.357		
19. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entreprenuership Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya - Persentase Pembinaan Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Persentase masyarakat yang berolahraga Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota - Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	97,52	64.114.409.451	46.628.968.125	1. Regulasi/Peraturan ket:Target tidak boleh lebih besar dari nilai sakip pemda	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	118	118	522.940.400	301.021.020	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya pemahaman teknis perencanaan dan evaluasi kinerja menyebabkan dokumen tidak lengkap atau tidak berkualitas serta Penyesuaian mendadak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											terhadap aturan baru sering menyebabkan revisi dokumen berulang	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	71	71	12.796.634.637	11.633.140.793	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya tenaga yang kompeten atau seringnya mutasi pengelola keuangan, serta SPJ, bukti transaksi, atau laporan kegiatan yang tidak tepat waktu. 2. Waktu ket:Kurangnya tenaga yang kompeten atau seringnya mutasi pengelola keuangan, serta SPJ, bukti transaksi, atau laporan kegiatan yang tidak tepat waktu.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	30.000.000	27.100.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Pengurus barang merangkap tugas lain sehingga pengelolaan dokumen BMD kurang optimal 2.Pengelola belum sepenuhnya memahami ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan BMD 2. Regulasi/Peraturan ket:1. Pengurus barang merangkap tugas lain sehingga pengelolaan dokumen BMD kurang optimal 2.Pengelola belum sepenuhnya memahami ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan BMD	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	2	0	-	-	1. Anggaran ket:rasionalisasi	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7	7	114.836.000	45.798.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Jumlah atau	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum memadai. 2. Aturan kepegawaian sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian dokumen. 3. Pegawai belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi kepegawaian. 2. Regulasi/Peraturan ket:1. Jumlah atau kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum memadai. 2. Aturan kepegawaian sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian dokumen. 3. Pegawai belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi kepegawaian. 3. Dukungan Pemimpin ket:1. Jumlah atau kompetensi pengelola administrasi kepegawaian belum memadai. 2. Aturan kepegawaian sering berubah sehingga memerlukan penyesuaian dokumen. 3. Pegawai belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi kepegawaian.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	10.632.944.000	6.012.229.129	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. - Jumlah pegawai administrasi yang tidak sebanding dengan beban kerja - Kompetensi pegawai belum merata. 2. - Masih banyak layanan administrasi dilakukan secara manual -Aplikasi belum terintegrasi antar unit kerja 2. Peralatan ket:1. - Jumlah pegawai administrasi yang tidak sebanding dengan beban kerja - Kompetensi pegawai belum merata. 2. - Masih banyak layanan administrasi dilakukan secara manual -Aplikasi belum terintegrasi antar unit kerja	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	8	8	11.564.994.030	11.209.547.845	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Refocusing anggaran atau keterbatasan fiskal daerah mengurangi kemampuan pengadaan aset baru. 2. Kurangnya kompetensi dan jumlah pengurus barang mempengaruhi pencatatan dan pengelolaan BMD. 2. Anggaran ket:1. Refocusing anggaran atau keterbatasan fiskal daerah mengurangi kemampuan pengadaan aset baru. 2. Kurangnya kompetensi dan jumlah pengurus barang mempengaruhi pencatatan dan pengelolaan BMD.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	5.235.290.149	4.890.397.354	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi. serta Keterlambatan anggaran atau pencairan dana Menghambat pelaksanaan kegiatan penunjang 2. Anggaran ket:beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi. serta Keterlambatan anggaran atau pencairan dana Menghambat pelaksanaan kegiatan penunjang	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	3,08	3,08	23.216.770.235	12.509.733.984	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Anggaran pemeliharaan yang terbatas menyebabkan tidak semua BMD dapat dipelihara sesuai kebutuhan,Terbatasnya jumlah dan kompetensi pengelola aset berdampak pada kualitas pemeliharaan serta Ketidaksesuaian data inventaris dengan kondisi riil menghambat perencanaan pemeliharaan. 2. Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ket:Anggaran pemeliharaan yang terbatas menyebabkan tidak semua BMD dapat dipelihara sesuai kebutuhan,Terbatasnya jumlah dan kompetensi pengelola aset berdampak pada kualitas pemeliharaan serta Ketidaksesuaian data inventaris dengan kondisi riil menghambat perencanaan pemeliharaan.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entreprenuership Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya - Persentase Pembinaan Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	Persen	79,27	99,94	13.851.830.218	12.820.224.808	1. Regulasi/Peraturan ket:Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta Kurangnya lapangan kerja 2. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran, Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta Kurangnya lapangan kerja	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	100	100	10.096.714.350	9.591.933.026	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Minim Koordinasi antara Steakholder dan Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana Kepemudaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	58,54	58,54	3.755.115.868	3.228.291.782	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Minim Koordinasi antara Steakholder dan Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana Kepemudaan	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga - Persentase masyarakat yang berolahraga Peningkatan prestasi olahraga - Jumlah Prestasi Olahraga	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga	Persen	35,41	100	49.113.429.856	37.849.928.883	1. Pihak Eksternal ket:Rendahnya minat dan motivasi masyarakat, Kurangnya disiplin dan konsistensi latihan,Pola hidup tidak sehat, Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga,Minimnya anggaran dan perhatian pemerintah,Kurangnya kompetisi atau event olahraga serta Kurangnya pelatih berkualitas 2. Anggaran ket:Rendahnya minat dan motivasi masyarakat, Kurangnya disiplin dan konsistensi latihan,Pola hidup tidak sehat, Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga,Minimnya anggaran dan perhatian pemerintah,Kurangnya kompetisi atau event olahraga serta Kurangnya pelatih berkualitas	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Persen	21,05	23	17.037.001.233	13.419.313.148	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi.Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi. 2. Pihak Eksternal ket:Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi.Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi. 3. Anggaran ket:Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua perkumpulan olahraga dapat difasilitasi.Pengurus perkumpulan olahraga belum memahami tata kelola organisasi dan administrasi bantuan dan Banyak perkumpulan olahraga belum memiliki legalitas atau tidak aktif secara administrasi.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga	Persen	100	100	16.816.123.007	12.980.104.831	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pemangkasan atau keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan.Panitia, wasit, dan tenaga teknis yang terbatas. 2. Anggaran ket:Pemangkasan atau keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan.Panitia, wasit, dan tenaga teknis yang terbatas.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Persen	52,5	52,5	4.983.330.000	2.147.470.728	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Anggaran pembinaan yang belum optimal, terutama untuk cabang olahraga non-unggulan.Terbatasnya jumlah pelatih bersertifikat di beberapa cabang olahraga. 2. Anggaran ket:Anggaran pembinaan yang belum optimal, terutama untuk cabang olahraga non-unggulan.Terbatasnya jumlah pelatih bersertifikat di beberapa cabang olahraga.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Persen	3,51	3,51	837.200.600	792.245.645	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pelatih tidak	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											bersertifikat atau jumlahnya terbatas mengurangi efektivitas pembinaan atlet.Anggaran terbatas menyebabkan jumlah atlet yang dapat dibina menjadi terbatas. 2. Anggaran ket:Pelatih tidak bersertifikat atau jumlahnya terbatas mengurangi efektivitas pembinaan atlet.Anggaran terbatas menyebabkan jumlah atlet yang dapat dibina menjadi terbatas.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	Persen	0,01	0,01	9.439.775.016	8.510.794.531	1. Waktu ket:Kesibukan kerja dan aktivitas sehari-hari mengurangi kesempatan berolahraga	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota - Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100	100	1.607.427.320	1.268.199.388	1. Peralatan ket:Keterbatasan pembina berkualitas,Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana,Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua 2. Pihak Eksternal ket:Keterbatasan pembina berkualitas,Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana,Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua 3. Anggaran ket:Keterbatasan pembina berkualitas,Keterbatasan anggaran, Minimnya sarana dan prasarana,Rendahnya partisipasi peserta serta Kurangnya dukungan orang tua	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	14,36	14,36	1.607.427.320	1.268.199.388	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tidak semua gugus depan memiliki pembina bersertifikat dan aktif, Faktor geografis, jarak, dan akses transportasi memengaruhi keaktifan organisasi. 2. Pihak Eksternal ket:Tidak semua gugus depan memiliki pembina bersertifikat dan aktif, Faktor geografis, jarak, dan akses transportasi memengaruhi keaktifan organisasi.	
20. BIDANG STATISTIK												
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE - Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	75,86	100	1.154.067.484	1.154.067.484	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber 2. Peralatan ket:Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber	
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD		11	11	1.003.334.684	976.478.472	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis 2. Anggaran ket:Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan		1	1	150.732.800	138.592.188	1. Regulasi/Peraturan ket:Belanja Tenaga Ahli di alihkan ke bagian umum kepegawaian dan ketatalaksanaan
21. BIDANG PERSANDIAN												

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE - Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	75,86	100	1.154.067.484	1.115.070.660	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber 2. Peralatan ket:Karena belum memiliki instrumen untuk mencari celah keamanan sistem elektronik dan untuk memantau anomasi serangan siber	
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	11	11	1.003.334.684	976.478.472	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis 2. Anggaran ket:Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas sesuai kompetensi teknis	
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan	1	1	150.732.800	138.592.188	1. Regulasi/Peraturan ket:Belanja Tenaga Ahli di alihkan ke bagian umum kepegawaian dan ketatalaksanaan	
22. BIDANG KEBUDAYAAN												
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	30	100	14.926.362.200	10.974.700.718	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Persentase Desa Budaya yang Aktif	Persen	100	100			1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pelestarian Seni dan Tradisi Budaya Lokal yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelakunya	Kegiatan	12	29	14.120.162.200	10.433.684.013	1. Anggaran ket:Kurang Tepatnya Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	Kegiatan	13	1	806.200.000	541.016.705	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam membuat indikator target kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	Persen	75	86,67	3.167.018.100	893.994.191	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam menyusubn anggaran kas kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	Kegiatan	13	25	3.167.018.100	893.994.191	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam menyusubn anggaran kas kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan	Persen	75,98	99,84	318.832.640	280.401.251	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam menyusun anggaran kas kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	Kegiatan	16	2	318.832.640	280.401.251	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang Tepatnya dalam penyusunan target kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara	Persen	100	60	1.016.593.900	452.657.191	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Target Indikator Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial	Persen	14,57	6,86			1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda	Persen	100	85			1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Target Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan	Lokasi	16	9	338.406.400	128.528.277	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Indikator Target Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	Lokasi	16	12	678.187.500	324.128.914	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Indikator	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Target Kegiatan	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Prosentase museum yang dikelola	Persen	75,98	98,71	1.359.650.320	195.141.579	1. Anggaran ket:Kurang tepatnya dalam Penyusunan Anggaran Kas	
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	Lokasi	2	2	1.359.650.320	195.141.579	1. Anggaran ket:Kurang Tepatnya Dalam Penyusunan Anggaran Kas	
23. BIDANG PERPUSTAKAAN												
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	99,37	19.699.802.758	17.364.548.416		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	333.040.799	292.883.933		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	12.694.057.430	11.676.581.019		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	62.051.600	46.436.000		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	112.049.200	59.073.440		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.509.959.280	2.255.291.767		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	3.492.250.141	2.592.249.662		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	228	200	496.394.308	442.032.595		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	42,34	25,27	6.053.496.800	3.373.277.463	1. Pihak Eksternal ket:Masih menungu hasil perhitungan dari Perpusnas RI pada tanggal 30 Januari 2026	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	7,24	7,24	2.576.707.780	1.929.467.891		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kali	5	5	3.476.789.020	1.443.809.572		
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	80	100	287.191.059	203.316.960		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	Dokumen	5	5	191.845.950	152.879.960	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 2. Peralatan ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 3. Pihak Eksternal ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas 4. Anggaran ket:Peralatan dalam pelaksanaan kegiatan kurang memadai, Keterlibatan pihak eksternal yang masih belum berperan serta SDM yang masih belum banyak mengetahui sistem kerja kegiatan serta Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan terbatas	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yg tersimpan dan/atau yang terdaftar di wilayah Kukar	Eksemplar	300	348	95.345.109	50.437.000	1. Peralatan ket:Keterbatasan Anggaran, peralatan serta saarana dan prasarana dalam pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Anggaran ket:Keterbatasan Anggaran, peralatan serta saarana dan prasarana dalam pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
24. BIDANG KEARSIPAN												
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Prosentase Arsip yang dikelola	Persen	100	100	509.376.070	459.237.809		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Berkas	66101	66101	368.072.220	332.052.592		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	Berkas	24000	25000	68.343.650	65.822.700		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	95	87,42	442.513.700	350.441.600	1. Pihak Eksternal ket:perhitungan msh menunggu Review Inspektorat	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Berkas	1000	1000	79.698.400	19.960.100		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Jumlah arsip yang diselamatkan dengan NSPK	Berkas	1000	1000	287.563.500	269.941.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Desa/Kelurahan								
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai dengan NSPK	Berkas	500	500	42.545.300	35.282.500		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Berkas	500	500	32.706.500	25.257.500		
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional - Tingkat ketersediaan arsip	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Prosentase izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Persen	100	100	34.110.800	28.741.102		
25. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,9	86,19	21.591.794.238	18.539.687.634		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	1.733.713.550	725.266.800		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	17.710.888.800	16.124.875.931		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	6	43.116.320	20.950.000		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	7.048.000	6.913.500		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	103.935.680	103.465.100		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	ASN	110	110	535.845.621	443.468.454		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12		-	-		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	5	5	1.126.295.017	996.681.194		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	90	90	330.951.250	118.066.655		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	104689	112,06	99.066.555.727	79.627.172.998		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Nelayan	2181	2181	78.157.255.276	62.045.643.973		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Orang	500	500	19.980.417.171	17.338.424.045		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah KUB Naik Kelas	KUB	8	9				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	Unit	3	3	322.055.400	95.133.580		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000	2000	527.913.200	102.104.900		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	Kapal	2000	2000	78.914.680	45.866.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	207881	104,6	312.248.408.597	296.736.954.047		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	Pokdakan	20	20	4.105.566.900	3.823.988.934		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	Pokdakan	5	5				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	TDPI	1000	1000	108.817.000	103.307.900		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Pembudidaya	1774	2150	308.034.024.697	292.809.657.213		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan - Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	20	100	8.799.487.110	3.974.514.812		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal/Destruktif Fishing	Persen	98	100				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	POKMASWAS	3	3	8.799.487.110	3.974.514.812		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Nelayan	400	400				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Reservat Diawasi	Reservat	3	3				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan - Nilai Produksi Perikanan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	26350	166,98	10.148.873.360	8.150.832.512		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan			Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1771	90,34				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	Tanda Daftar Usaha	10	10	321.905.530	122.667.536		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	Unit Usaha	5	5	284.628.760	266.633.110		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	POKLAHSAR	25	25	9.542.339.070	7.761.531.866		
26. BIDANG PARIWISATA												
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Predikat akuntabilitas kinerja Dispar - Nilai SAKIP	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai	74	83,93	42.762.739.756	40.237.004.342	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Jumlah SDM yang terbatas, cukup signifikan menghambat pelaksanaan kegiatan dalam penyelesaian kegiatan	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7	7	688.634.280	485.051.771		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	2	2	37.832.129.306	36.698.054.454		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	2	2	28.560.000	28.560.000	1. Anggaran ket:Dikarenakan adanya Rekonsiliasi maka pagu pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dikurangi/dihapus sehingga tidak dapat dilaksanakan, sehingga target tidak tercapai	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Objek yang Dikelola	Laporan	12	12	7.690.000	7.520.000		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	-	-	1. Anggaran ket:Dikarenakan adanya Rasionalisasi maka pagu pada sub Kegiatan ini dikurangi/dihapus sehingga tidak dapat dilaksanakan, sehingga target tidak dapat tercapai.	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	5	5	885.861.410	622.816.649		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.899.702.796	1.718.949.468		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan	12	12	1.420.161.964	676.052.000		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan - Jumlah Kunjungan Wisatawan	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	65,76	100	12.246.293.472	9.414.996.423		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen	2	2	7.518.722.050	6.123.326.828		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Dikelola	Paket	4	4	4.065.028.360	2.881.262.461		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisat a yang di rekomen dasikan untuk mendap at TDUP	Dokumen	10	6	662.543.062	410.407.134		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan - Okupansi	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Okupansi	Persen	32,28	121,44	21.102.949.975	18.887.767.996		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen	11	4	21.102.949.975	18.887.767.996	1. Anggaran ket:masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tetapi belum direalisasikan pemabayaran kepada penyedia	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif - Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	6	100	11.150.570.820	8.410.796.568		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Yang Tersedia	Dokumen	1	0	56.069.720	14.843.600	1. Anggaran ket:Pagu Kegiatn terasionalisasi	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi	7	9	11.094.501.100	8.395.952.968		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif - Presentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	100	891.365.853	831.444.976		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Dokumen	8	5	788.196.353	728.275.476		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku EKRAF yang Dikembangkan	Orang	20	30	103.169.500	103.169.500		
27. PERTANIAN												
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66	101,47	77.775.887.544	70.061.970.433		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	2	474.355.900	259.492.751		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	17	2	62.258.882.668	58.440.975.883	1. Anggaran ket:Adanya kesalahan dalam penyusunan Anggran 2. Waktu ket:Adanya kesalahan dalam penyusunan Anggran	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	71.721.175	47.380.000		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	145.315.500	52.329.500		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.798.738.550	1.602.900.214		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	50	50	6.513.179.480	4.515.741.687		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	4.812.858.871	3.687.103.561		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340	340	1.700.835.400	1.456.046.837		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian - Produksi Padi - Produksi Jagung - Produksi Palawija (Porang) - Produksi Hortikultura	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	41802,48	29,58	72.340.739.430	51.956.800.678		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	20000	5				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Luas Tanam Palawija (Porang)	Hektar (Ha)	55	0				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	29278,24	0,09			1. Regulasi/Peraturan ket:anggaran terefisiensi sehingga target belum terpenuhi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	37061	0,84				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	18440,3	4,12				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	17414000	0				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian - Produktivitas Padi - Produktivitas Jagung	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	12500	301,22	67.183.764.490	52.628.987.756	1. Waktu ket:Pada pelaksanaan terhambat oleh faktor cuaca dimana pada waktu pelaksanaan intensitas curah hujan tinggi	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	21	61,9			1. Waktu ket:Pada pelaksanaan terhambat oleh faktor cuaca dimana pada waktu pelaksanaan intensitas curah hujan tinggi	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Meter	10000	112,77			1. Waktu ket:Waktu dipengaruhi dengan keadaan alam yang tidak stabil	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	Unit	4	50				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	Unit	19	142,11				
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	2	1	289.399.000	50.369.000	1. Anggaran ket:Efiisensi Anggaran	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	80	149	66.894.365.490	52.578.618.756	1. Waktu ket:Waktu dipengaruhi dengan keadaan alam yang tidak stabil	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan - Produksi Daging - Produksi Telur	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	96	100	755.793.620	726.659.040		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan			Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5	60			1. Regulasi/Peraturan ket:Dalam Anggaran terkadang belum	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tersedianya sehingga dalam pelayanan belum dapat maksimal 2. Anggaran ket:Dalam Anggaran terkadang belum tersedianya sehingga dalam pelayanan belum dapat maksimal	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	182.603.420	177.311.880	1. Pihak Eksternal ket:Masih membutuhkan data terkait daerah wabah penyakit sehingga melakukan kegiatan menjadi tepat sasaran di peternak dan ternak yang terdampak penyakit	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	Jenis	2	2	106.414.000	101.014.000		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	2	2	322.380.000	311.234.660		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persen	3	2	144.396.200	137.098.500		
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian - Produksi Padi	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	95	100	1.765.527.400	442.743.000	1. Anggaran ket:diperlukan tambahan bahan obat-obatan untuk pengendalian hama dan penyakit	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT Pertanian	Hektar (Ha)	2400	2542,05	1.765.527.400	442.743.000	1. Anggaran ket:perlu tambahan anggaran untuk penyediaan jenis obat pengendalian OPT	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	Rekomendasi	35	37,14	517.627.800	158.109.640	1. Pihak Eksternal ket:relevansi penyampaian untung ruginya perizinan	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	20	14	258.998.800	41.240.500	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi yang disampaikan ke objek kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	Dokumen	15	7	258.629.000	116.869.140	1. Pihak Eksternal ket:relevansi penyampaian narasi kepada objek perijinan	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Nilai Tukar Petani (NTP)	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	4	70,75	12.095.498.383	9.247.651.979	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi serta perspektif inovasi untuk di tiru petani	
	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan lembaga petani yang dibina	Persen	95	85	12.095.498.383	9.247.651.979	1. Pihak Eksternal ket:relevansi narasi yang disampaikan ke pelaku utama dan usaha sebagai motivasi	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	91,61	19.677.781.179	16.768.531.104	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih kurangnya pengetahuan terkait penyusunan data penilaian kelengkapan SAKIP sesuai permenpan RB 53 tahun 2014	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	489.650.800	277.670.772		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	15.792.706.297	13.585.648.857		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	95.237.600	89.467.500		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	6.286.000	5.700.000		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	194.191.400	183.894.006		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	824.823.361	715.598.700		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	1	1	221.468.600	185.910.000		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.471.473.921	1.155.367.587		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	56	88	581.943.200	569.273.682		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28795	112,13	17.496.183.400	12.887.578.058		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	307390	59,72			1. Pihak Eksternal ket:adanya beberapa IUP PBS yang dicabut, sehingga mempengaruhi jumlah luas Areal Kelapa Sawit PBS	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17988	95,9			1. Pihak Eksternal ket:adanya alih fungsi lahan dari karet ke komoditi perkebunan lainnya terutama kelapa sawit	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3442	36,47			1. Pihak Eksternal ket:adanya alih fungsi lahan dari komoditi lada ketambang dan ke komoditi lain	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7306	92,56			1. Pihak Eksternal ket:Pengembangan Kelapa Dalam yang cukup besar cuma ada di beberapa kecamatan yang ada dipesisir	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	115	132,78			1. Pihak Eksternal ket:adanya tanaman kopi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang rusak dan mati	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	95	140,68				
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	248	105,02				
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	9	105,56			1. Pihak Eksternal ket:minat pekebun masih kurang terkait komoditi kelor	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang Diawasi	Paket	152	152	17.434.805.400	12.827.628.058		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	1	1	61.378.000	59.950.000		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan - Produksi Kelapa Sawit Rakyat - Produksi Kelapa Sawit PBS - Produksi Karet - Produksi Lada - Produksi Kelapa Dalam - Produksi Kopi - Produksi Kakao - Produksi Aren - Produksi Kelor	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	3512	9,4	1.165.341.517	950.851.737	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan fisik pembangunan jalan produksi tidak bisa dilaksanakan	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	3	0			1. Anggaran ket:Adanya rasi0nalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan dan pengawasan terhadap fisik kegiatan tidak dapat dilaksankan yang bias dilaksanakan Cuma pembuatan dokumen perencanaannya	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1	0	-	-		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	8	1	1.165.341.517	950.851.737	1. Anggaran ket:Adanya rasinalisasi anggaran sehingga Pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan dan pengawasan terhadap fisik kegiatan tidak dapat dilaksankan yang bias dilaksanakan Cuma pembuatan dokumen perencanaannya	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan - Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat - Produktivitas Kelapa Sawit PBS - Produktivitas Karet - Produktivitas Lada - Produktivitas Kelapa Dalam - Produktivitas Kopi - Produktivitas Kakao - Produktivitas Aren - Produktivitas Kelor	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	38,67	100	209.341.900	180.861.987	1. Anggaran ket:adanya rasionaliasi anggaran	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Ha	260	125	209.341.900	180.861.987		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan - Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat - Produktivitas Kelapa Sawit PBS - Produktivitas Karet - Produktivitas Lada - Produktivitas Kelapa Dalam - Produktivitas Kopi - Produktivitas Kakao - Produktivitas Aren - Produktivitas Kelor	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	200	50	231.079.400	174.067.232	1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada pengurangan target	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan			Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	10	80			1. Anggaran ket:adanya rasionalisasi anggaran sehingga ada pengurangan target	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	210	108	231.079.400	174.067.232		
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun - NTP Perkebunan	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	19,62	87,56	427.694.100	388.312.146	1. Anggaran ket:Adanya rasionalisasi Anggaran	
	PERTANIAN	Dinas Perkebunan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	24	24	427.694.100	388.312.146		
28. BIDANG KEHUTANAN												
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) - Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Persen	33,33	45	748.252.400	532.567.940	1. Anggaran ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan satu dokumen. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan satu dokumen.	
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	3	1	748.252.400	532.567.940	1. Anggaran ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan 1 Dokumen 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk penyusunan 1 Dokumen	
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura	Kegiatan	1	0			1. Pihak Eksternal ket:Setelah mengadakan Rapat dan Menganalisa data dan informasi di lapangan bahwa kerjasama yang akan di laksanakan terkendala terkait dengan regulasi	
29. BIDANG PERDAGANGAN												

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	98,63	35.849.655.146	28.514.206.131	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurangnya pemenuhan data dukung dalam penyampaian realisasi kinerja OPD Disperindag	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.082.530.400	872.316.999	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 2. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 3. Waktu ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	15.348.778.812	13.522.201.872	1. Peralatan ket:Gangguan teknis pada aplikasi keuangan, jaringan, atau integrasi data.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	187.881.000	175.132.103	1. Regulasi/Peraturan ket:Masih terdapat aset yang belum lengkap administrasinya atau belum tercatat secara optimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12.895.000	12.690.000	1. Peralatan ket:Pendataan belum sepenuhnya akurat sehingga memengaruhi realisasi pendapatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.141.433.800	1.101.033.311	1. Pihak Eksternal ket:Kurangnya sinkronisasi antara unit kerja dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.737.284.200	1.272.663.866	1. Peralatan ket:Fasilitas pendukung administrasi yang belum optimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	3	1.910.000.000	1.762.458.400	1. Pihak Eksternal ket:Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12.009.302.224	9.109.791.680	1. Pihak Eksternal ket:Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1450	120	1.419.549.710	685.917.900	1. Peralatan ket:Informasi kondisi BMD belum diperbarui secara berkala sehingga menyulitkan perencanaan pemeliharaan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	98,63	35.849.655.146	28.514.206.131	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurangnya pemenuhan data dukung dalam penyampaian realisasi kinerja OPD Disperindag	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.082.530.400	872.316.999	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 2. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 3. Waktu ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Persentase pelaku	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Cakupan rekomendasi peijinan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan	Persen	100	100	139.592.000	99.103.760	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Birokrasi yang rumit,	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perdagangan	usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)								ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan 2. Peralatan ket:Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan 3. Regulasi/Peraturan ket:Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan teknis dan komitmen perijinan terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kemitraan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen rekomendasi izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin usaha toko Swalayan yang diterbitkan	Persen	76	2	69.013.000	49.913.760		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	Surat TDG	64	2	25.173.000	15.370.000		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi	15	0	45.406.000	33.820.000		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Luar Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi			-	-		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	75	18,67	13.390.289.600	11.159.949.686	1. Pihak Eksternal ket:Belum optimalnya pemanfaatan pasar-pasar yang sudah terbangun di setiap desa	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	4,22	4,740.52			1. Pihak Eksternal ket:Pedagang yang dipindah dari pasar Tangga Arung ke Pasar Mangkurawang mengalami penurunan omzet karena sepi pembeli. serta adanya relokasi dan banyaknya pasar tumpah dan maraknya orang berjualan di rumah-rumah pinggir jalan yang mengakibatkan kurangnya pembeli untuk pergi belanja langsung ke pasar sehingga pedagang yang berjualan di dalam pasar milik pemerintah mengeluhkan omset pendapatan yang berkurang yang dimana menjadi alasan bagi mereka dalam membayar retribusi	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Indeks Kualitas Pasar	Nilai	62	119,13			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun da dikelola	Unit	16	23	13.108.047.200	10.930.615.736		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (unit pengelola pasar) yang memperoleh pembinaan	Unit UPP	3	2	282.242.400	229.333.950		
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	3,57	85,43	1.831.236.800	1.395.491.127	1. Peralatan ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau trasportasi yang belum memadai	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Regulasi/Peraturan ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau trasportasi yang belum memadai 3. Pihak Eksternal ket:Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau trasportasi yang belum memadai	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	Persen	98,39	100,68			1. Peralatan ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan. 2. Regulasi/Peraturan ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	Jenis	13	13	166.692.800	141.168.500	1. Pihak Eksternal ket:Melihat dari data tahun sebelumnya diproyeksikan untuk bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru (NATARU) Komoditas Beras, Cabai, Bawang, Daging Ayam, Tomat serta barang pokok lainya akan mengalami kenaikan harga jika permintaan pasar meningkat dan mempengaruhi ketersediaan barang pokok tersebut.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	Persen	66,67	66,67	1.542.529.800	1.134.814.627	1. Pihak Eksternal ket:Secara umum, pergerakan harga bulan ini masih terkendali, namun komoditas seperti Beras perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan kutai kartanegara sebagian besar bergantung pada beras yang didatangkan dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa hingga faktor yang menghambat distribusi dan tingkat panen pada daerah produsen sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga beras di wilayah kutai kartanegara, Beberapa jenis Cabai juga sangat bergantung dari pengiriman dari daerah Pulau Jawa sehingga harga dan ketersediaan tergantung pada faktor distribusi dan panen di daerah produsen, dan Bawang pula mengalami kondisi yang serupa, perlu adanya perhatian khusus pada komoditas berikut dikarena volatilitasnya yang tinggi menjelang akhir November 2025 dimana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											permintaan pasar pada jenis komoditas berikut semakin mengalami peningkatan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Ton	86,82	86,82	122.014.200	119.508.000	1. Pihak Eksternal ket:Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan.Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Pertumbuhan ekspor produk unggulan	Persen	100	90	940.498.200	913.006.861	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor. 2. Peralatan ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor. 3. Pihak Eksternal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											ket:Produk ekspor sering kali menghadapi masalah kualitas yang belum memenuhi standar internasional, sehingga sulit bersaing di pasar global,Biaya produksi yang tinggi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, dapat membuat harga produk menjadi kurang kompetitif,Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi, dan penyimpanan dapat menghambat efisiensi distribusi produk ekspor.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	Kali	10	9	940.498.200	913.006.861	1. Anggaran ket:Kurangnya anggaran karena efisiensi sehingga pelaku usaha yang di fasilitasi tidak maksimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Metrologi	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	Persen	30	95,53	551.900.600	323.396.800	1. Peralatan ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang 2. Pihak Eksternal ket:Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	19,41	19,41	551.900.600	323.396.800	1. Pihak Eksternal ket:Adanya Debagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada Terdapat kecamatan Yang tidak memiliki Pasar tradisional sehinggan pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayabna tera/tera ulang	
30. BIDANG PERINDUSTRIAN												
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan - Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	98,63	35.849.655.146	28.514.206.131	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Kurangnya pemenuhan data dukung dalam penyampaian realisasi kinerja OPD Disperindag	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	1.082.530.400	872.316.999	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 2. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan 3. Waktu ket:Kurangnya koordinasi antar bidang sebagai harmonisasi data untuk menjadi baseline penetapan target indikator kegiatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	15.348.778.812	13.522.201.872	1. Peralatan ket:Gangguan teknis pada aplikasi keuangan, jaringan, atau integrasi data.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	187.881.000	175.132.103	1. Regulasi/Peraturan ket:Masih terdapat aset yang belum lengkap administrasinya atau belum tercatat secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12.895.000	12.690.000	1. Peralatan ket:Pendataan belum sepenuhnya akurat sehingga memengaruhi realisasi pendapatan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.141.433.800	1.101.033.311	1. Pihak Eksternal ket:Kurangnya sinkronisasi antara unit kerja dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.737.284.200	1.272.663.866	1. Peralatan ket:Fasilitas pendukung administrasi yang belum optimal	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	3	1.910.000.000	1.762.458.400	1. Pihak Eksternal ket:Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12.009.302.224	9.109.791.680	1. Pihak Eksternal ket:Terbatasnya penyedia yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah tertentu.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1450	120	1.419.549.710	685.917.900	1. Peralatan ket:Informasi kondisi BMD belum diperbarui secara berkala sehingga menyulitkan perencanaan pemeliharaan	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah - Persentase Sentra IKM Berbasis Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Arti Luas Yang Aktif	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Jumlah Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	Dokumen	1	100	4.232.906.991	1.819.462.035	1. Anggaran ket:Penganggaran di APBD-Perubahan disahkan pada dua bulan terakhir pelaksanaan TA 2025,sehingga tidak memungkinkan untuk penyelesaian pekerjaan lantai Efoxi dan penambahan IPAL Pabrik Rumput Laut Kec. Muara Badak, serta adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan pembangunan Pabrik minyak makan merah di Kecamatan Kembang Janggut belum dapat dilaksanakan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	Sentra IKM	1	1	4.232.906.991	1.819.462.035	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Basis Data Sektor Industri 2. Ketersediaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Tenaga Kerja Terampil 3. Inovasi dan Teknologi 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Basis Data Sektor Industri 2. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil 3. Inovasi dan Teknologi	
31. BIDANG TRANSMIGRASI												
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru - Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	Kawasan	1	100	131.386.100	68.939.625	1. Anggaran ket:Efisiensi	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1	100			1. Regulasi/Peraturan ket:Kewenangan penetapan kawasan di kementrian Transmigrasi	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	Dokumen	1	0,7	131.386.100	68.939.625	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggaran	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru - Jumlah Kawasan Transmigrasi Yg Dikembangkan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	1	100	350.151.560	209.811.950	1. Anggaran ket:Efisiensi	
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	1	0,7	350.151.560	209.811.950	1. Anggaran ket:Efisiensi Anggran	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 93. Pelaksanaan Urusan Pendukung Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
32. SEKRETARIAT DAERAH												
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan - Indeks Kualitas Kebijakan bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan - Efektifitas Koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan - Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai	80	100	176.528.871.902	157.153.414.167	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kadangkala masih ada beberapa pelaksana yang perlu diiingkatkan untuk melaksanakan tusinya	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	98,5	101,52			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Tiingginya volume kegiatan sehingga agak kesulitan membagi SDM yang ada	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	90	100			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:keterbatasan jumlah SDM yang support dalam pelaksanaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kegiatan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			PERSENTASE ASET YANG DI MANFAATKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	Persen	79	126,58			1. Anggaran ket:Keterbatasan kasda	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	281.111.600	134.961.680	1. Anggaran ket:Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami efisiensi	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	80.308.450.407	75.461.869.185		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	295.136.800	260.267.451	1. Anggaran ket:keterbatasan anggaran kasda, namun tetap dilaksanakan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	24.587.000	24.194.090		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	13.771.004.600	12.280.742.601	1. Anggaran ket:Tidak adanya ketersediaan dana Pada Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	102	104	17.269.249.505	15.737.432.926	1. Anggaran ket:Tidak Adanya Ketersediaan Dana pada Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	16.026.701.688	14.522.222.725	1. Anggaran ket:Tidak Adanya Ketersediaan Dana Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	132	132	26.093.715.630	17.463.957.152	1. Anggaran ket:Tidak Adanya Ketersediaan Dana Kas Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	1.291.993.488	834.828.293		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	12	12	1.253.095.900	1.167.736.355	1. Anggaran ket:efisiensi dan pemangkasan transfer keuangan daerah	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan	1001	100	19.913.825.284	19.265.201.709		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Indeks Kualitas Kebijakan bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Efektifitas Koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama - Nilai LPPD	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	99	85.433.261.995	74.643.946.191	1. Pihak Eksternal ket:kadangkala dukungan dari pihak eskternal belum sesuai harapan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	100	100			1. Anggaran ket:Ketersediaan kasda yang sepenuhnya tidak bisa memenuhi belanja masyarakat	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100			1. Waktu ket:kadangkala memerlukan waktu yang agak lama pada saat berproses	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	90	111,11			1. Anggaran ket:Keterbatasan kasda	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	30	6	1.268.314.000	782.818.109		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Orang dan Lembaga	2589	4734	82.803.665.075	72.802.694.055	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Efisiensi anggaran dan keterbatasan kualitas SDM 2. Anggaran ket:Efisiensi anggaran dan keterbatasan kualitas SDM	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	100	100	760.871.800	534.812.757		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen	20	20	600.411.120	523.621.270	1. Anggaran ket:Kurangnya anggaran pada kegiatan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam - Indeks Kualitas Kebijakan bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam - Efektifitas Koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam - Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	4.021.800.444	3.330.801.624		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan	Persen	95	100			1. Anggaran ket:Keterbatasan kasda	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persen	100	100				
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah			PERSENTASE PENGADAAN BARANG JASA YANG DI SELESAIKAN	Persen	100	100				
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	12	12	1.051.839.400	741.938.175	1. Anggaran ket:Ketidakpastian ketersediaan dana (Surat Penyediaan Dana)	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen	14	14	859.248.454	748.145.661	1. Anggaran ket:keluaran / hasil tidak bisa maksimal	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	595	590	1.333.484.090	1.202.927.163		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	31	31	777.228.500	637.790.625	1. Anggaran ket:Dengan adanya pengurangan anggaran, pelaksanaan kegiatan makan minum rapat dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat menjadi kurang optimal, karena alokasi dana untuk kebutuhan tersebut mengalami pemotongan sehingga berdampak pada efektivitas dan kenyamanan jalannya rapat	
33. SEKRETARIAT DPRD												

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD - Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai	83	120,48	126.815.874.698	96.859.385.514		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	960.063.000	897.709.600		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	6	6	25.228.238.321	23.133.744.699		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	271.564.000	234.718.180		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	1.922.365.690	1.079.790.554		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	8.601.335.068	5.392.338.072		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1389	1389	12.182.213.000	6.533.098.088		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	14.363.072.332	12.158.358.002		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	254	254	15.468.900.400	2.579.363.891		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan	2	2	36.738.518.887	35.168.893.015		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Layanan	3	3	11.079.604.000	9.681.371.413		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Meningkatkan Dukungan	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN**	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-	Persen	100	100	59.684.274.909	54.426.573.829		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah	Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD - Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	**FUNGSI DPRD**	Rapat Kerja DPRD							
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	Persen	100	100				
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	PERDA	16	16	7.481.036.000	7.031.272.181		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan	Rapat	18	18	1.428.366.500	1.420.105.216		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	Kali	190	190	1.990.774.000	1.898.964.347		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	24.730.371.500	21.233.950.577		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang terlaksana	Persen	100	100	6.089.245.000	5.511.213.684		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Persen	100	100	349.482.500	324.867.968		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	100	17.614.999.409	17.006.199.856		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 94. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
34. INSPEKTORAT DAERAH												
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88	86,61	34.427.410.148	24.130.237.070		
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	100			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan SDM Pengawas.	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	750.000.000	79.893.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	21.141.423.715	19.594.259.870		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan barang milik daerah (BMD) pada perangkat Daerah	Dokumen	3	2	90.745.000	40.800.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	1.547.300.000	324.972.528		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	1.059.588.340	709.877.284		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	40	39	6.365.896.000	1.381.712.800		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	12	2.872.457.093	1.575.647.271		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah yang disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	17	100	600.000.000	423.074.317		
			Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI - Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	97	125,02	6.951.793.000	3.549.761.386	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI - Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengawasan	Dokumen	70	74	5.851.793.000	2.923.881.518		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	19	26	1.100.000.000	625.879.868		
			Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	85	118,34	2.962.337.000	1.298.276.998	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. - Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	4	4	500.000.000	417.142.381		
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	85	86	2.462.337.000	881.134.617		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 95. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
35. PERENCANAAN												
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah - Skor penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah - Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,85	87,61	36.598.794.501	30.110.081.854	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan komponen dalam cara hitung penilaian SAKIP oleh KEmenpan RB	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	8	423.695.920	268.642.411		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	6	6	16.526.209.186	15.123.997.740		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	6	4	119.892.400	85.122.600		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi	Dokumen	8	8	856.946.836	704.255.515		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Kepegawaian Perangkat Daerah							
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah ASN	Orang	60	10				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pakaian	Stell	368	368				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	3.291.662.230	2.814.908.638		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	4.761.321.090	3.702.902.761		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	4.086.335.899	2.948.679.915		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	6.532.730.940	4.461.572.274		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah - Skor penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah - Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	100	90,98	4.398.376.564	2.734.552.316	1. Pihak Eksternal ket:1. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 2. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 3. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga interview kebijakan tidak berjalan optimal 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 2. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 3. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga interview kebijakan tidak berjalan optimal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											3. Manajemen Resiko ket:1. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 2. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 3. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga interview kebijakan tidak berjalan optimal	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	6	103	1.976.687.064	1.655.430.060		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pendampingan Perencanaan	OPD	58	59			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:-	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2	2				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	72	72			1. Pihak Eksternal ket:Kesiapan OPD	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	2	2				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	7	5	1.367.433.500	570.135.987		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah pendampingan ketersediaan data	Urusan	32	32				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi Daerah	6	0				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	177	177			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Terbatasnya SDM yang dapat memahami Penngelolaan Data	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	Layanan Data & Informasi	6	20			1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Dukungan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Komitmen Kecamatan belum Optimal Karena belum tersedianya regulasi daerah 2. Regulasi/Peraturan ket:Dukungan Komitmen Kecamatan belum Optimal Karena belum tersedianya regulasi daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	7	7	1.054.256.000	508.986.269		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah - Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	100	91,17	5.604.120.870	4.664.010.475	1. Pihak Eksternal ket:1. OPD masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan kebijakan pusat, diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi, dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak dapat tercapai 3. Monev hanya berfokus pada pelaporan, Rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	100	75,45			1. Pihak Eksternal ket:1. OPD masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan kebijakan pusat, diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi, dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak dapat tercapai 3. Monev hanya berfokus pada pelaporan, Rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan	Persen	100	81,13			1. Pihak Eksternal ket:1. OPD masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD						Perubahan kebijakan pusat, diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi, dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak dapat tercapai 3. Monev hanya berfokus pada pelaporan, Rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	71	77	1.161.005.340	929.572.539	1. Pihak Eksternal ket:- OPD fokus target sendiri, kurang mau berkolaborasi - Data antar OPD tidak sinkron - Perubahan kebijakan pusat mendadak → rencana daerah terganggu - Pemahaman perencanaan berbasis kinerja belum merata.	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	37	40	2.889.144.300	2.590.601.873		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	76	8	1.553.971.230	1.143.836.063	1. Waktu ket:waktu pelaksanaan kegiatan bidang bersamaan dengan agenda penyusunan RKPD, Ranwal RPJM dan Perubahan RKPD 2025	
36. KEUANGAN												
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Persentase Administrasi umum Perangkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	80	75	57.197.792.065	48.800.695.542		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	392.721.280	95.894.800		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	38.770.834.020	32.785.516.041		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	4	4	87.209.000	84.268.900		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11	11	75.892.800	35.306.300		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	80	80	1.504.587.000	1.362.170.209		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	80	80	10.436.572.000	10.131.273.855		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.939.861.565	1.876.296.425		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	80	80	2.990.114.400	2.429.969.012		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Optimalnya Penerimaan Dana bagi Hasil - Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat	Persen	80	100	284.900.800	235.401.284		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	Triliun Rupiah	80	11	284.900.800	235.401.284		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah			Realisasi Penerimaan DBH Pusat	Triliun Rupiah	80	11				
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	70	100	4.945.806.181	3.033.035.180		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Validitas data WP dan Penerimaan Pajak Daerah	Persen	13,6	1,85	4.945.806.181	3.033.035.180		
37. KEPEGAWAIAN												

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					856.946.836	704.255.515		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	856.946.836	704.255.515		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah ASN	Orang	60	10				
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Pakaian	Stell	368	368				
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah - Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88	87,4	38.352.067.288	33.931.425.623	1. Anggaran ket:1. Masih ada beberapa penetapan Tujuan dan Target Bidang yang belum terperinci dan spesifik 2. Adanya Regulasi dari Pusat terkait Rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan target kinerjanya berupa draft Peraturan Bupati 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:1. Masih ada beberapa penetapan Tujuan dan Target Bidang yang belum terperinci dan spesifik 2. Adanya Regulasi dari Pusat terkait Rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan target kinerjanya berupa draft Peraturan Bupati	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	25	672.331.150	590.456.611		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	16	13.795.746.997	11.645.846.927		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	4	153.935.040	117.259.000		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	267.980.464	26.565.512	1. Regulasi/Peraturan ket:Proses review dan verifikasi produk/jasa oleh tim verifikator LKPP atau instansi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											terkait memerlukan waktu lama. - Banyaknya antrian produk yang menunggu validasi, terutama untuk komoditas umum seperti IT, dan konstruksi.	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1.115.487.350	725.615.015	1. Peralatan ket:1. Minimnya peralatan kantor (komputer, printer, alat arsip) atau kondisi yang sudah usang. 2. Ruang kerja yang sempit atau tidak layak. 3. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan administrasi umum. 4. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak. 2. Anggaran ket:1. Minimnya peralatan kantor (komputer, printer, alat arsip) atau kondisi yang sudah usang. 2. Ruang kerja yang sempit atau tidak layak. 3. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan administrasi umum. 4. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak.	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	20.812.246.000	19.621.698.835	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Terlambatnya pengesahan APBD atau revisi anggaran menghambat proses pengadaan. 2. Keterbatasan waktu pelaksanaan karena anggaran baru tersedia di tengah tahun anggaran 3. Petugas pengadaan belum bersertifikasi atau kurang memahami regulasi (seperti Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). 4. Ketergantungan pada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pihak ketiga (konsultan, penyedia) yang belum tentu andal	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.144.340.287	901.522.453	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Alokasi anggaran yang terbatas atau tidak sesuai dengan volume kebutuhan. 2. Prioritas anggaran lebih difokuskan pada program utama sehingga jasa penunjang dianggap sekunder.Keterlambatan proses lelang atau pengadaan langsung karena hambatan administratif atau teknis. 3. Penggunaan sistem e-Procurement yang belum optimal atau sering mengalami gangguan	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12	12	390.000.000	302.461.270	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Anggaran pemeliharaan seringkali tidak diprioritaskan dalam APBD. 2. Biaya pemeliharaan dianggap beban tambahan, bukan investasi jangka panjang 3. Pengguna barang kurang peduli terhadap kondisi dan perawatan barang yang digunakan. 4. Tidak adanya sanksi atau sistem tanggung jawab jika barang rusak akibat kelalaian. 2. Anggaran ket:1. Anggaran pemeliharaan seringkali tidak diprioritaskan dalam APBD. 2. Biaya pemeliharaan dianggap beban tambahan, bukan investasi jangka panjang 3. Pengguna barang kurang peduli terhadap kondisi dan perawatan barang yang digunakan. 4. Tidak adanya sanksi atau sistem tanggung jawab jika barang rusak akibat kelalaian.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah - Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	95	100	5.905.643.556	3.501.243.488	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya regulasi pusat terkait Rasiobalisasi anggaran berdampak pada beberapa dokumen masih dalam bentuk Draft Perbub dan Proses Harmonisasinya di laksanakan di tahun 2026	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	5299	5299	1.379.495.970	554.077.103	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Adanya regulasi rasionalisasi anggaran sehingga sosialisasi Buzeting rencana kebutuhan ASN tidak di laksanakan 2. Pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Kabupaten tidak laksanakan terkendala tidak cukupnya anggaran 2. Anggaran ket:1. Adanya regulasi rasionalisasi anggaran sehingga sosialisasi Buzeting rencana kebutuhan ASN tidak di laksanakan 2. Pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Kabupaten tidak laksanakan terkendala tidak cukupnya anggaran	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2495	2810	515.600.800	380.210.735	1. Regulasi/Peraturan ket:waktu dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan mempengaruhi output kegiatan 2. Waktu ket:waktu dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan mempengaruhi output kegiatan	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	PNS	1700	23776	3.318.700.230	1.966.267.779	1. Anggaran ket:Ketersediaan SPD tidak sesuai anggaran kas yang disusun	
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	11491	11491	691.846.556	600.687.871	1. Anggaran ket:Kurangnya ketersediaan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditagihkan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
38. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah - Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persen	24,64	100	4.767.316.920	3.391.231.334	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran sehingga PPPK Tahap 2 blum bisa melaksanakan Orientasi	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	200	10000	1.540.080.720	986.132.633	1. Anggaran ket:Ketersediaan SPD tidak sesuai dengan anggaran kas yang disusun	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan "	ASN	106	2417	3.227.236.200	2.405.098.701	1. Anggaran ket:Ketersediaan SPD tidak sesuai anggaran kas yang disusun	
39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah - Persentase Pemanfataan Hasil Kelitbangan - Indeks Inovasi Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	129	100	12.741.776.127	11.651.020.253	1. Peralatan ket:belum terpenuhinya peralatan pendukung dan waktu pelaksanaan 2. Waktu ket:belum terpenuhinya peralatan pendukung dan waktu pelaksanaan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	441.328.292	437.677.565	1. Waktu ket:Faktor penghambat tidak signifikan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	7	1	11.014.866.845	10.031.841.810		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	63.881.800	63.051.498		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	6	80.011.420	79.765.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Umum	Pelayanan	7	7	327.571.508	289.464.512		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	85.455.040	50.527.000		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	419.533.222	396.446.004		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	243	243	309.128.000	302.246.864		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah - Persentase Pemanfataan Hasil Kelitbangan - Indeks Inovasi Daerah	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	100	5.215.569.972	4.609.626.160	1. Anggaran ket:kualitas output penelitian berkurang karena keterbatasan dana	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Persen	100	100				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	100				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	100	100			1. Anggaran ket:adanya kendala penyelesaian pembayaran sampai laporan ini di input	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Dokumen	1	1	587.584.800	582.046.440	1. Anggaran ket:Kualitas output penelitian berkurang karena keterbatasan dana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pengkajian Peraturan							
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Dokumen	2	2	2.072.131.000	2.062.128.622		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	3	3	797.228.450	768.016.798		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen	5	5	1.758.625.722	1.197.434.300	1. Anggaran ket:Adanya kendala penyelesaian pembayaran sampai laporan ini di input	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 96.Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
40. URUSAN KEWILAYAHAN												
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	100	51.607.594.956	45.377.370.729		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	340.087.570	171.191.580		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	36	36	45.318.753.127	41.427.158.194		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1	1	64.546.000	35.417.498		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	Orang	1	0	-	-	1. Anggaran ket:Anggaran Kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					administrasi kepegawaian						ini tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	7	7	1.985.329.208	1.025.048.495		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	13	154.381.000	7.060.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.752.733.347	2.554.483.795		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	32	32	991.764.704	157.011.167		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	100	56.665.669.476	41.327.766.894		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	628.973.786	413.078.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	35.325.000	3.030.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	330	331	56.001.370.690	40.911.658.394		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	51.896.878.127	47.902.077.588		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	36	36	8.786.000.000	7.324.015.984		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	24	12.053.376.849	10.161.937.256		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	288	288	31.057.501.278	30.416.124.348		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	80	100	142.961.020	97.733.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	142.961.020	97.733.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	80	100	169.250.000	111.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	169.250.000	111.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	100	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	0		-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	64,47	9.591.063.329	7.478.536.432	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	322.914.570	143.652.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	18	18	7.513.584.053	6.366.353.854		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	3	3	178.650.374	59.920.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	74	2	27.082.000	14.070.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	9	7	511.389.090	348.939.500	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	0	3.100.000	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	599.343.242	353.299.410	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	48	22	435.000.000	192.301.068	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	89,33	43.112.606.620	38.115.465.650	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	72,67			1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi dan dukungan pimpinan 2. Dukungan Pemimpin ket:Adanya perubahan regulasi dan dukungan pimpinan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	300.935.800	258.154.910		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	0	57.385.000	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan DPPA akibat Rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	42.754.285.820	37.857.310.740	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	469.471.940	440.045.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	101.485.140	84.685.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	5	2	367.986.800	355.360.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	118.690.000	63.070.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Kegiatan	20	20	118.690.000	63.070.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	193.707.000	71.251.500	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	193.707.000	71.251.500	1. Regulasi/Peraturan ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi 2. Dukungan Pemimpin ket:Terlaksana atas dukungan pimpinan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah akibat rasionalisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	90	100	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Adanya perubahan regulasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	101,32	132.936.150	122.100.000	1. Anggaran ket:Pelaksanaan terkendala dalam proses penyesuaian anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	78,95	10.108.163.701	8.987.479.385	1. Anggaran ket:Pelaksanaan terkendala dalam proses penyesuaian anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	1	132.936.150	122.100.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu			Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12	1	103.039.560	78.659.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	48	1	8.604.025.527	7.879.588.462		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat	Unit	50	1	241.432.308	46.230.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	100	1	275.517.800	248.291.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	1	764.148.506	623.318.217		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	50	1	120.000.000	111.391.806		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	64	62,5	537.309.620	255.612.400	1. Pihak Eksternal ket:kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta permasalahan koordinasi dan komunikasi antara LPM/LPP dengan masyarakat dan pemerintah.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	64	1	201.582.750	138.625.000	1. Anggaran ket:ketidakrutinan pembinaan oleh camat, terbatasnya waktu dan pagu dana dalam penyusunan RKP-Desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi penghambat.. 2. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:ketidakrutinan pembinaan oleh camat, terbatasnya waktu dan pagu dana dalam penyusunan RKP-Desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi penghambat.. 3. Waktu ket:ketidakrutinan pembinaan oleh camat, terbatasnya waktu dan pagu dana dalam penyusunan RKP-Desa, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi penghambat..	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Lembaga	4	1	335.726.870	116.987.400	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala. 2. Peralatan ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala. 3. Regulasi/Peraturan ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala. 4. Anggaran ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											5. Dukungan Pemimpin ket:kurangnya komitmen masyarakat, rendahnya etos kerja, perubahan mendadak dalam pola masyarakat, kurangnya koordinasi, dan perubahan nilai dan adat istiadat dan Selain itu, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pengetahuan juga menjadi kendala.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	74	54,05	43.948.100	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya penegakan hukum, Sumber Daya Manusia (SDM), Sosialisasi dan Pertisipasi Masyarakat, kurangnya Koordinasi, dan faktor lainnya	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	1	43.948.100	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Penegakan hukum yang belum optimal dan kurangnya perlindungan masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pelanggaran hukum, kriminalitas, dan gangguan terhadap ketertiban umum.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	74	54,05	500.609.380	485.802.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kurangnya kompetensi dan profesionalisme pegawai, kurangnya responsivitas terhadap keluhan, dan kurangnya informasi yang tersebar luas kepada masyarakat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	67	1	500.609.380	485.802.500	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:meliputi kendala regulasi, teknis, dan political will pejabat dalam pengalokasian program dan anggaran. Selain itu, kurang optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi serta koordinasi antar sektor juga menjadi penghambat. Faktor sumber daya manusia, anggaran, sarana dan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											prasarana, serta kebijakan pemerintah daerah turut berperan 2. Anggaran ket:meliputi kendala regulasi, teknis, dan political will pejabat dalam pengalokasian program dan anggaran. Selain itu, kurang optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi serta koordinasi antar sektor juga menjadi penghambat. Faktor sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kebijakan pemerintah daerah turut berperan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	72	55,56	40.090.500	38.905.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:kurangnya pemahaman SKPD terhadap pelayanan desa, kurangnya fasilitas kerja seperti komputer dan laptop, serta kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan komputer dan kurangnya motivasi. Selain itu, lambannya administrasi dan pengelolaan dana desa yang kurang efektif juga menjadi penghambat. 2. Peralatan ket:kurangnya pemahaman SKPD terhadap pelayanan desa, kurangnya fasilitas kerja seperti komputer dan laptop, serta kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan komputer dan kurangnya motivasi. Selain itu, lambannya administrasi dan pengelolaan dana desa yang kurang efektif juga menjadi penghambat.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	15	1	40.090.500	38.905.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Masalah dalam pengelolaan anggaran APBDes Induk, pembangunan sarana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											prasarana pemerintahan desa, pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan perangkat desa, serta laporan pejabat desa persiapan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi yang tidak optimal, dan koordinasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat. 2. Pihak Eksternal ket:Masalah dalam pengelolaan anggaran APBDes Induk, pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan perangkat desa, serta laporan pejabat desa persiapan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi yang tidak optimal, dan koordinasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat. 3. Anggaran ket:Masalah dalam pengelolaan anggaran APBDes Induk, pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan perangkat desa, serta laporan pejabat desa persiapan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi yang tidak optimal, dan koordinasi yang kurang juga dapat menjadi penghambat.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	114,6	6.515.197.152	5.404.603.303	1. Peralatan ket:Data pendukung kinerja belum tersedia secara lengkap, valid, dan tepat waktu	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	262.932.100	115.950.879	1. Pihak Eksternal ket:Program “copy-paste” dari tahun sebelumnya tanpa analisis situasi.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat	Laporan	15	6	5.094.091.031	4.464.743.959	1. Anggaran ket:Penggunaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah yang akuntabel						anggaran yang tidak sesuai prioritas atau aturan menghambat akuntabilitas.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1033	1	215.019.400	154.138.430	1. Kejelasan Penetapan Tujuan / target ket:Data aset lama belum diperbarui sehingga banyak selisih antara fisik dan catatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	6	6	170.198.470	156.984.453	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kapasitas SDm yan terbatas, kurangnya kompetensi ASN dan sarana perasarana yang belum memadai serta ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	500	7	441.055.465	386.355.859	1. Anggaran ket:Keterbatasan anggaran dan dana yang dialokasikan serta ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dan kegaiatan dengan rencana yang ditetapkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	85	6	331.900.686	126.429.723	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Keterbatasan SDM, Anggaran dan dana yang dialokasikan serta ketiksesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	33.782.945.146	30.714.379.514	1. Peralatan ket:Fasilitas pendukung pelayanan belum sepenuhnya optimal.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	65	96,92	-	-	1. Anggaran ket:Keterbatasan pendanaan menyebabkan pembangunan dan perbaikan belum merata	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan	Kegiatan	100	0	275.496.440	151.594.560	1. Regulasi/Peraturan ket:Penolakan terhadap perubahan dari pihak tertentu yang merasa	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif						nyaman dengan cara kerja lama	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	10	0	55.042.000	44.098.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Prosedur administrasi yang kompleks dapat memperlambat keputusan dan pelaksanaan kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	0	33.452.406.706	30.518.686.954	1. Anggaran ket:Minimnya dana operasional kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	394.387.200	264.193.700	1. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	6	50	152.220.200	135.434.750	1. Anggaran ket:Dana Desa tidak cukup untuk semua kebutuhan prioritas	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	30	242.167.000	128.758.950	1. Regulasi/Peraturan ket:Kurangnya kesadaran pentingnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamata	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	98,5	100.260.000	85.264.750	1. Pihak Eksternal ket:Tidak semua tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat terlibat aktif secara berkelanjutan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	10	10	100.260.000	85.264.750	1. Regulasi/Peraturan ket:Tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP, polisi, dan pemerintah daerah.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	99,4	239.499.000	52.320.000	1. Pihak Eksternal ket:Perbedaan kewenangan antar instansi membutuhkan waktu dan penyesuaian	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah								dalam pelaksanaan.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	100	0	239.499.000	52.320.000	1. Regulasi/Peraturan ket:Ego sektoral dan kurangnya komunikasi lintas lembaga	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	102,95	7.943.687.781	6.660.676.426		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	289.159.940	64.967.438		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	4.768.314.409	4.227.295.048		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	4	4	223.157.700	171.145.935		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	220.252.896	92.762.000	1. Anggaran ket:ketidaktersedianan anggaran karena kondisi keuangan daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	3205	3205	571.901.600	478.573.963		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	90	90	618.166.600	547.806.582		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	787.789.876	639.306.840		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	20	20	464.944.760	438.818.620		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100	39.186.676.120	28.864.409.017	1. Anggaran ket:kegiatan Fisik di pelimpahan kewenangan camat sebanyak 63 paket belum terbayarkan (	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah								utang)	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	3	3	267.654.900	212.431.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	80	80	66.775.000	44.075.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	202	201	38.852.246.220	28.607.903.017	1. Anggaran ket:Kegiatan pekerjaan Fisik tidak terbayarkan karena ketidaktersediaan anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	78	100	4.743.385.884	4.207.014.950		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	6	6	208.326.000	158.274.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	4.535.059.884	4.048.740.950		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	81	100	98.780.200	68.073.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	98.780.200	68.073.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	74	100	383.010.500	320.237.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah									
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	383.010.500	320.237.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	98	6.581.190.998	5.533.340.136	1. Anggaran ket:Kurangnya Ketersediaan Anggaran di APBDP sehingga mempengaruhi realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	65	65	302.500.000	301.600.000	1. Anggaran ket:Anggaran pada 2 sub kegiatan tidak dapat di realisasikan karena anggran yang tersedia tidak cukup	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	41	41	4.136.147.335	3.573.850.241		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	12	11	204.201.400	109.280.000	1. Anggaran ket:kurangnya Ketersediaan dana mempengaruhi realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	51	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	4	4	720.152.200	641.620.000	1. Anggaran ket:kurangnya Ketersediaan anggaran menghambat proses tahapan kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	27	10	374.544.315	72.739.000	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana yang tidak mencukupi sehingga tahapan kegiatan tidak dapat di laksanakan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	803.645.748	794.390.895	1. Anggaran ket:Ketersediaan anggaran mempengaruhi realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	30	30	40.000.000	39.860.000	1. Anggaran ket:Kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan akan tetapi realisasi anggaran tidak dapat di serap maksimal karena ketersediaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dana	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	89	23.504.907.097	21.204.672.183	1. Anggaran ket:Kurangnya ketersediaan dana sehingga berpengaruh terhadap realisasi kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	89			1. Anggaran ket:Terkendala dengan kurangnya ketersediaan dana sehingga berpengaruh terhadap realisasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	321.650.000	240.425.000	1. Anggaran ket:Faktor ketersediaan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	2	2	50.000.000	50.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	114	106	23.133.257.097	20.914.247.183	1. Anggaran ket:kurangnya ketersediaan dana sehingga proses realisasi keuangan terhambat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	80	100	361.600.000	360.250.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	3	100.000.000	99.350.000	1. Anggaran ket:Tahapan kegiatan berjalan akan tetapi ketersediaan dana tidak mencukupi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	5	5	261.600.000	260.900.000	1. Anggaran ket:Ketersediaan dana mempengaruri penyerapan anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta	Persen	70	100	140.385.100	140.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	140.385.100	140.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	210.000.000	129.550.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	210.000.000	129.550.000	1. Anggaran ket:Realisai keuangan tidak dapat terserap maksimal karena kurangnya ketersediaan dana	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	88,48	20.840.844.330	18.011.556.746	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:1. Belum optimalnya pencapaian bobot 4 unsur penilaian AKIP berupa Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja inetrnal; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Regulasi/Peraturan ket:1. Belum optimalnya pencapaian bobot 4 unsur penilaian AKIP berupa Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja inetrnal; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 3. Waktu ket:1. Belum optimalnya pencapaian bobot 4 unsur penilaian AKIP berupa Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja inetrnal; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	181.340.540	101.449.900	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	14.831.887.435	13.593.978.552	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1017	1017	233.637.500	58.705.000	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	74	74	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : 1. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; 2.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Penundaan realisasi anggaran karena keterbatasan kasda, pemilihan berdasarkan skala prioritas 2. Waktu ket:Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : 1. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; 2. Penundaan realisasi anggaran karena keterbatasan kasda, pemilihan berdasarkan skala prioritas	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	10	9	1.177.079.331	755.004.795	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	30	31	413.155.000	140.087.340	1. Regulasi/Peraturan ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang. 2. Waktu ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	3.011.560.024	2.749.141.115		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	545	425	992.184.500	613.190.044	1. Regulasi/Peraturan ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang. 2. Waktu ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	100	40.451.441.788	31.308.376.827	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100	-	-	1. Regulasi/Peraturan ket:. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	380.121.850	321.640.050	1. Regulasi/Peraturan ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, dan menjadi utang 2. Waktu ket:Realisasi keuangan tidak maksimal, dan menjadi utang	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kegiatan	2	2	40.071.319.938	30.986.736.777	1. Waktu ket:Realisasi anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				kepada Camat	yang menjadi kewenangan Camat						tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	21.659.702.710	18.333.243.748	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	18	7.104.174.460	4.131.775.748	1. Regulasi/Peraturan ket:Kegiatan tidak terlaksana 100% karena kondisi ketersediaan kasda yang tidak dapat diprediksi 100% serta menghindari potensi timbulnya utang, maka Kelurahan tidak melaksanakan SubKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berupa pelatihan-pelatihan. 2. Anggaran ket:Kegiatan tidak terlaksana 100% karena kondisi ketersediaan kasda yang tidak dapat diprediksi 100% serta menghindari potensi timbulnya utang, maka Kelurahan tidak melaksanakan SubKegiatan Pemberdayaan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Masyarakat di Kelurahan yang berupa pelatihan-pelatihan.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	96	78	14.555.528.250	14.201.468.000	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	172.557.500	74.250.000	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang. 2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	172.557.500	74.250.000	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	693.637.450	628.991.550	1. Regulasi/Peraturan ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2. Waktu ket:1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang menyebabkan : a. perubahan anggaran belanja dalam RKAP/DPPA; b. Karen aketerbatasan kasda, maka Realisasi keuangan tidak maksimal dan menjadi utang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1	1	693.637.450	628.991.550	1. Waktu ket:Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal karena keterbatasan ketersediaan kasda.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	100,41	22.612.742.607	18.188.186.240	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi dan tahapan kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	241.084.100	90.308.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	14	15.869.094.388	13.915.354.804		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1030	1030	223.428.800	36.520.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	90	0	264	-	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena adanya Efisiensi Anggaran Tahap 1 dan 2 sehingga angaran di hapus	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	6	6	2.022.200.730	1.329.896.757		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	96	93	311.553.200	281.813.511	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Karena adanya efisiensi anggaran sehingga tidak tercapai sesuai dengan target	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Bulan	12	12	3.420.260.899	2.320.395.419		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					disediakan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	80	80	524.856.490	213.897.749		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	100	71.416.722.833	57.598.127.851		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang Melibatkan Perangkat Daerah Dan instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara effektif	Kegiatan	2	2	434.900.000	382.581.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang Difasilitasi	SPM	1	1	33.495.000	33.377.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	70.948.327.833	57.182.169.351	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	100	22.657.161.900	20.780.096.954		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	80	8.884.548.900	7.615.232.354		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	41	39	13.772.613.000	13.164.864.600	1. Waktu ket:ada 3 Paket Kegiatan tidak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kondisi/ waktu yang tidak mendukung	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Persen	80	100	141.430.000	49.433.850		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah		dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan	3	3	141.430.000	49.433.850	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	71,45	100	492.837.000	462.280.450	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	492.837.000	462.280.450		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	89,43	7.756.833.495	6.012.567.005		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	10	261.461.921	173.518.949		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	5.636.982.513	4.716.812.891		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	696	696	80.471.600	60.696.956		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	86	86	10.000.000	10.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	5	5	207.318.859	202.129.630		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Unit	6	4	771.073.388	149.818.016	1. Waktu ket:Pelaksanaan terkendala waktu	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	643.305.214	566.348.914		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	24	24	146.220.000	133.241.649		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	41	243,9	28.187.751.040	26.083.715.183		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	90	111,11	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	339.075.500	331.145.021		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	60.407.300	58.854.970		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	27.788.268.240	25.693.715.192		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	524.069.150	508.941.654		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	14	14	155.152.950	145.778.169		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasayarakatan di Berdayakan	Lembaga	5	5	368.916.200	363.163.485		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	101.901.920	93.250.300	1. Anggaran ket:Dana Belum Tersedia	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	101.901.920	93.250.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	323.628.200	320.771.580	1. Anggaran ket:Belum Tersedianya Dana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	1	1	323.628.200	320.771.580		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,5	98	11.919.715.874	10.718.821.496	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Masih terdapat personil yg kurang maksimal dalam memberikan dukungan khusunya dalam hal penyediaan data dan dokumen.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	21	318.707.000	239.552.650		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	9.373.453.306	8.681.032.899		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Laporan	27	27	183.255.000	152.322.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	60	10	181.240.000	79.226.000	1. Pihak Eksternal ket:Jadwal pelaksanaan Diklat dari BKPSDM tidak tersedia.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	107	107	262.417.224	191.922.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio	10	10	525.000.000	507.377.415		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	706.479.633	617.930.282		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	369.163.711	249.457.850		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	60	100	10.221.035.143	8.645.322.539	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kapasitas Petugas layanan belum optimal.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	60	100	-	-	1. Pihak Eksternal ket:Koordinasi kurang maksimal.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	326.137.500	276.379.545		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	2	2	142.928.800	108.675.700		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	55	55	9.751.968.843	8.260.267.294		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	80	100	623.979.053	446.911.050		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	20	20	163.182.500	126.906.650		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Berdayakan	Lembaga	5	5	347.186.553	268.394.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan.	Kegiatan	4	4	113.610.000	51.610.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	80	100	113.533.000	16.187.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	4	113.533.000	16.187.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	80	100	283.805.000	177.787.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	283.805.000	177.787.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	100	158.269.200	147.293.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	20	20	158.269.200	147.293.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	101,49	6.889.121.197	5.673.629.961	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	237.115.150	76.332.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	4.513.030.548	3.936.393.115		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	590	531,02	129.642.862	33.423.242	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	31	0	-	-	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	7,6	218.666.360	190.122.320	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	17	17	507.000.000	506.725.485	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	932.508.112	750.794.649		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	566	566	351.158.165	179.839.150		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	23.270.526.300	18.688.343.273	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	88,1	100	-	-	1. Manajemen Resiko ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	176	176	309.641.500	290.593.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	4	4	42.505.000	18.680.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	22.918.379.800	18.379.070.023	1. Manajemen Resiko ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya Kegiatan Fisik yang terkendala dengan faktor alam sehingga jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	60	111,12	537.533.700	468.975.100	1. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kali	36	36	132.203.200	97.640.800		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	24	24	405.330.500	371.334.300		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	102,67	45.252.550	24.310.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurang nya personel/sumber daya manusianya dalam menyiapkan kegiatan sehingga membuat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan belum maksimal	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	45.252.550	24.310.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	55	118,18	175.398.000	165.568.372	1. Manajemen Resiko ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula 2. Waktu ket:Adanya proses pengurangan pagu anggaran sesuai kebijakan, sehingga berdampak dengan jadwal pelaksanaan dan proses pengadaan tidak sesuai rencana semula	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	175.398.000	165.568.372		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	71,42	51,11	5.000.000	-	1. Manajemen Resiko ket:Jadwal Kegiatan di sesuai kan dengan kegiatan di desa 2. Waktu ket:Jadwal Kegiatan di sesuai kan dengan kegiatan di desa	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	21	0	5.000.000	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	100	8.718.961.632	7.463.407.998		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	290.184.865	74.055.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	75	75	6.464.812.432	5.883.563.171		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	230	230	199.195.000	128.738.120		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	8	352.929.037	248.756.757		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	20	754.402.000	687.768.788		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	567.438.298	398.554.562		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	10	10	90.000.000	41.971.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	88,5	6.742.058.050	5.070.529.766		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	88,5	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	5	5	457.905.750	300.679.856		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	10	10	93.227.000	3.360.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	6.190.925.300	4.766.489.910		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	525.093.150	348.652.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penguatan Koordinasi									
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	13	13	154.276.650	105.095.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Laporan	10	10	370.816.500	243.557.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	104.509.000	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	5	5	104.509.000	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	611.558.000	450.543.607		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	90	90	611.558.000	450.543.607		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	97	100	129.390.000	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	13	13	129.390.000	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	74,63	5.704.294.903	4.264.039.519		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	340.667.825	137.384.450		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	3.558.452.117	2.970.957.698		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Unit	25	12	96.696.050	46.180.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					yang di administrasikan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang			-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	5	5	135.560.000	127.604.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	11	792.060.100	514.650.821		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	558.931.611	337.494.831		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	16	16	221.927.200	129.767.219		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	94,13	2.641.665.808	2.487.285.876		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	45	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	354.908.900	292.127.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	38.960.000	12.800.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	9	9	2.247.796.908	2.182.358.476		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	89,53	465.346.200	416.641.625		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	3	136.001.000	115.395.025		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	5	5	329.345.200	301.246.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	96	121.846.705	102.017.045		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	121.846.705	102.017.045		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	94,07	183.225.000	172.355.879		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	1	1	183.225.000	172.355.879		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	95,65	7.014.702.960	5.819.582.743	1. Manajemen Resiko ket:Kurangnya Evidence yang dibutuhkan dalam penilaian	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	289.840.530	181.226.700		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	37	37	4.654.489.664	4.102.422.215		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	50	50	132.135.000	102.475.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	30	30	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	9	9	409.001.400	236.652.250		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	18	18	673.265.500	546.673.986		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	486.837.482	428.920.035		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	50	50	369.133.384	221.212.557		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	15.183.054.900	14.774.314.823	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya Saranan dan Prasarana Pendukung dalam melakukan pelayanan 2. Anggaran ket:Kurangnya Saranan dan Prasarana Pendukung dalam melakukan pelayanan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	86,36	100			1. Pihak Eksternal ket:Banyaknya Kendaraan Yang Melintas Jalan Dengan Bobot Berlebih Sehingga Jalan Mengalami Kerusakan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	11	335.552.000	196.319.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan	2	2	57.032.400	34.700.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	12	0	-	-	1. Waktu ket:Belum Adanya Penjadwalan Untuk Kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	14.790.470.500	14.543.295.323		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	524.015.600	333.508.100		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	12	141.846.000	60.934.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan lembaga yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	382.169.600	272.574.100		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	138.771.000	121.780.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	4	4	138.771.000	121.780.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	181.069.000	70.508.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	181.069.000	70.508.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	65	100	25.000.000	17.160.000	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Kurangnya SDM dalam melakukan pendampingan ke Desa dan tidak disiplinnya Desa dalam menyampaikan laporan yang dibutuhkan 2. Waktu ket:Kurangnya SDM dalam melakukan pendampingan ke Desa dan tidak disiplinnya Desa dalam menyampaikan laporan yang dibutuhkan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	11	25.000.000	17.160.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89	74,07	9.053.302.436	7.119.272.328		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	286.915.400	121.413.600		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	5	5	6.607.425.310	5.790.013.322		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	4	7	159.070.500	105.533.591		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	5	5	190.838.340	171.101.080		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	3	665.925.000	7.860.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	383.260.256	307.964.548		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	12	7	759.867.630	615.386.187		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	89	95,17	2.717.071.500	2.365.065.542		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	89	95,27				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	225.960.600	180.985.470		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	3	1,5	62.419.000	39.180.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	33	15	2.428.691.900	2.144.900.072		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	89	95,17	2.717.071.500	2.365.065.542		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	89	95,27				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3	3	225.960.600	180.985.470		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	3	1,5	62.419.000	39.180.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	89	97,74	491.322.800	378.961.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	4	121.636.300	117.896.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	5	369.686.500	261.065.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	89	95,51	115.780.400	59.142.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	89	89	115.780.400	59.142.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	89	100	216.052.300	130.338.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1	1	216.052.300	130.338.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64	89,95	8.608.456.112	7.104.394.772	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Banyak bukti dukung yang tidak dapat disajikan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	304.088.800	166.838.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	5.043.923.165	4.658.924.964		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	500	500	110.783.500	46.580.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	31	31	119.340.000	14.072.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	9	9	524.957.178	421.066.274		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	24	24	1.556.626.985	1.067.068.852		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	478.736.484	424.786.988		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	24	24	470.000.000	305.057.294		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	12.050.575.992	9.536.308.378		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	78,5	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	1	319.538.000	275.905.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	60.004.000	7.410.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	11.671.033.992	9.252.993.378		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	571.395.450	479.035.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	2	2	150.937.250	109.720.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	5	5	420.458.200	369.315.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	82.557.000	42.025.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	82.557.000	42.025.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	336.868.000	297.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1	1	336.868.000	297.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	71,4	117,04	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	80	100	12.403.557.540	10.781.566.221		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rerncana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	227.358.002	166.351.700		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	14	14	10.090.806.961	8.977.809.855		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang di Adminitrasikan	Unit	56	56	180.997.300	104.424.190		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	99	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	10	10	569.184.420	495.776.702		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Sediakan	Unit	25	25	274.457.200	114.030.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Sediakan	Bulan	12	12	808.088.657	755.023.692		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Pelihara	Unit	36	30	252.665.000	168.149.682		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	29.623.083.560	28.483.858.311		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	2	199.024.000	133.260.985		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	2	1	30.000.000	-	1. Pihak Eksternal ket:Pihak Ekternal,Kegiatan Kepramukaan yang tidak dilaksanakan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	173	175	29.394.059.560	28.350.597.326		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	11.343.789.860	10.397.586.091		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	1	1	99.851.000	24.009.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	5	4.408.351.980	3.715.606.608		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	102.233.500	67.683.925		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	102.233.500	67.683.925		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	802.640.000	777.194.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	1500	1500	802.640.000	777.194.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Nilai	80	73,75	7.039.476.533	5.742.145.785		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	294.307.900	170.562.099		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	5.162.314.681	4.630.377.459		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	331	331	121.685.000	42.010.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	33	33	42.315.700	39.627.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	8	252.785.871	236.067.910		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Unit	18	18	468.926.200	107.071.583		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					disediakan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	612.279.581	486.012.075		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	115	115	84.861.600	30.417.659		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	100	35.932.717.180	32.185.014.306		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	81,3	99,63				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	5	5	323.902.180	221.242.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	66.449.400	27.889.800		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	35.542.365.600	31.935.882.156		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	100	503.659.703	386.431.080		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	16	16	120.151.103	71.694.400		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Yang di Laksanakan Desa/Kelurahan	Kegiatan	8	8	383.508.600	314.736.680		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh	Persen	100	50	87.974.420	18.435.000	1. Manajemen Resiko ket:kegiatan terkendala waktu dan koodinasi 2. Waktu ket:kegiatan terkendala waktu dan koodinasi	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Masyarakat di wilayah Kecamatan							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	3	2	87.974.420	18.435.000	1. Anggaran ket:keterbatasan waktu dan anggaran 2. Manajemen Resiko ket:keterbatasan waktu dan anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	169.584.200	89.776.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	169.584.200	89.776.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	90	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	8	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	72,24	5.028.368.877	3.878.611.563		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	167.974.400	54.389.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	3.833.746.141	3.129.781.183		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	4	4	86.615.000	50.050.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	43	19	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	7	7	172.438.550	160.724.542		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	17	17	80.000.000	80.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	557.174.786	291.176.740		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	14	14	130.420.000	112.490.098		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	82,14	22.447.504.750	18.553.623.154	1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	88,1	82,13			1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	362.393.750	307.612.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	4	4	43.636.000	17.160.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	22.041.475.000	18.228.850.654		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	67	74,63	534.240.000	403.189.950	1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kali	2	2	188.150.000	96.330.150		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1	346.090.000	306.859.800		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	65	67,68	581.734.800	393.693.006	1. Anggaran ket:-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	2	2	581.734.800	393.693.006		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat	Persen	73	0	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Organisasi dan Penguatan	**PEMERINTAHAN DESA**	Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik							
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	10	0	-	-		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	74,27	19.391.681.259	15.990.421.762		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	289.527.800	180.561.017		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	15.231.044.010	12.821.369.465		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Unit	1030	1030	163.797.000	126.949.998		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	90	90	12.264.000	9.624.999		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	6	6	1.460.776.100	1.430.697.756		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	96	96	280.697.000	259.964.502		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.733.156.349	961.239.178		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	150	150	220.419.000	200.014.847		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	133,33	56.489.263.750	46.007.178.285		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	4	4	421.393.000	339.540.025		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Laporan	1	1	5.000.000	4.940.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	56.062.870.750	45.662.698.260		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	99,31	21.775.083.166	19.928.201.959		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	2	2	210.000.000	149.305.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	80	7.876.490.000	6.603.114.609		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	467	467	13.688.593.166	13.175.782.350		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	175.000.000	146.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	2	175.000.000	146.620.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	71,45	100	350.000.000	267.387.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	5	5	350.000.000	267.387.000		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau

Tabel 97. Pelaksanaan Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
41. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89	84,65	11.461.833.939	10.292.240.785	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket:Pemenuhan bukti dukung penilaian	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	136.685.000	96.687.032		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20	20	8.821.705.829	8.072.353.938		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	59.937.000	46.917.000		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	15.910.000	11.730.000		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	841.594.000	668.779.009		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	403.286.000	372.136.950		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	527.167.817	438.202.852		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	70	655.548.293	585.434.004	1. Anggaran ket:Tidak sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang direncanakan karena adanya pembatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan sehingga pelaksanaan pemeliharaan ditunda pemeliharaannya 2. Waktu ket:Tidak sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang direncanakan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											karena adanya pembatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan sehingga pelaksanaan pemeliharaan ditunda pemeliharaannya	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	2,17	100	4.724.874.000	4.297.139.083		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	12	12	4.724.874.000	4.297.139.083		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	Persen	14,51	100	67.095.173.206	66.363.571.410		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Dokumen	12	12	67.095.173.206	66.363.571.410		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas yang tertib administrasi	Persen	12,9	100	228.070.000	113.280.959	1. Regulasi/Peraturan ket:Perlu terus dilakukan sosialisasi ormas	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	30	30	228.070.000	113.280.959	1. Regulasi/Peraturan ket:Ormas bisa untuk tidak melaporkan keberadaannya	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	Persen	1,45	100	638.629.000	444.350.140		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Dokumen	5	5	638.629.000	444.350.140		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	729.922.000	429.295.744		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	12	12	729.922.000	429.295.744		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-Pantau